

**Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 33 Tahun 2021**

tentang

**Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2021**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590)

35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
39. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor)
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

42. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
46. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Pemerintahan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
8. RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
9. KUPA yaitu dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didefinisikan sebagai program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. Rencana Kerja Anggaran yang disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

BAB II **PERUBAHAN RKPD**

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021 dilakukan berdasarkan:

- a. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau.
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI: PENUTUP.

- (2) Narasi Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Perubahan Renja SKPD Tahun 2021.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Dalam rangka menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman dalam:

- a. Penyusunan KUPA Tahun 2021 serta PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- b. Pembahasan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



SUYANTO



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xiii
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Sinergi Antar Dokumen.....	I-8
1.4. Maksud dan tujuan	I-9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD 2021.....	I-10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	II-1
2.1. Urusan Pendidikan	II-2
2.2. Urusan Kebudayaan.....	II-10
2.3. Urusan Kesehatan	II-11
2.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-23
2.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-30
2.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Realisasi Pelaksanaan Program	II-35
2.7. Urusan Sosial.....	II-42
2.8. Urusan Tenaga Kerja	II-47
2.9. Urusan Transmigrasi.....	II-50
2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-51
2.11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-55
2.12. Urusan Pangan	II-58
2.13. Urusan Lingkungan Hidup	II-61
2.14. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-64
2.15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.....	II-67
2.16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-71
2.17. Urusan Perindustrian	II-75
2.18. Urusan Perdagangan.....	II-76

2.19. Urusan Perhubungan	II-79
2.20. Urusan Penanaman Modal	II-83
2.21. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-87
2.22. Urusan Statistik dan Persandian.....	II-89
2.23. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	II-90
2.24. Urusan Perpustakaan	II-93
2.25. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-96
2.26. Urusan Pariwisata	II-101
2.27. Urusan Pertanian.....	II-105
2.28. Urusan Pertanahan	II-109
2.29. Urusan Kearsipan	II-111
2.30. Unsur Sekretariat Daerah.....	II-112
2.31. Unsur Sekretariat DPRD.....	II-122
2.32. Kewilayahan.....	II-126
2.33. Urusan Pengawasan	II-153
2.34. Unsur Perencanaan.....	II-157
2.35. Unsur Keuangan.....	II-163
2.36. Unsur Kepegawaian.....	II-173
2.37. Unsur Pendidikan dan Pelatihan.....	II-177
2.38. Unsur Penelitian dan Pengembangan.....	II-178
2.39. Unsur Pemerintahan Umum.....	II-179

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021..... III-1

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kinerja Perekonomian Daerah.....	III-1
3.1.2. Arah kebijakan Ekonomi Daerah	III-9
3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah	III-10
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-10
3.2.2. Arah kebijakan Belanja Daerah.....	III-15
3.2.3. Kerangka kebijakan Pembiayaan Daerah	III-19
3.2.4. Kerangka Pendanaan Daerah.....	III-22

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Visi dan misi pembangunan	IV-2
4.2. Isue Strategis ,Tujuan dan sasaran	IV-4
4.2.1. Isue Strategis.....	IV-4
4.2.2. Tujuan	IV-8
4.2.3. Sasaran.....	IV-8

4.3. Arah kebijakan Pembangunan	IV-9
4.4. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2021	IV-10
4.4.1. Tema Pembangunan.....	IV-10
4.4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	IV-10
4.4.3. Program Prioritas.....	IV-11
4.4.4. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten Tahun 2021	IV-24
4.5. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-25
4.6. Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-28
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1. Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020	V-1
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2021.....	II-2
Tabel 2. 2: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.....	II-10
Tabel 2. 3: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2021.....	II-11
Tabel 2. 4: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021.....	II-24
Tabel 2. 5: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021	II-30
Tabel 2. 6: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.....	II-36
Tabel 2. 7: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021.....	II-43
Tabel 2. 8: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021.....	II-47
Tabel 2. 9: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021.....	II-51
Tabel 2. 10: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021.....	II-52
Tabel 2. 11: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.....	II-56
Tabel 2. 12: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan Tahun Anggaran 2021.....	II-58
Tabel 2. 13: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.....	II-62
Tabel 2. 14: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021	II-64
Tabel 2. 15: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021	II-67
Tabel 2. 16: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021	II-71
Tabel 2. 17: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian Tahun Anggaran 2021.....	II-75

Tabel 2. 18: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perdagangan	
Tahun Anggaran 2021.....	II-77
Tabel 2. 19: Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Urusan Perhubungan	
Tahun Anggaran 2021.....	II-79
Tabel 2. 20: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal	
Tahun Anggaran 2021.....	II-83
Tabel 2. 21: Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2021	II-87
Tabel 2. 22: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2021	II-89
Tabel 2. 23: Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2021	II-90
Tabel 2. 24: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan	
Tahun Anggaran 2021.....	II-94
Tabel 2. 25: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021.....	II-97
Tabel 2. 26: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pariwisata	
Tahun Anggaran 2021.....	II-101
Tabel 2. 27: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Tahun Anggaran 2021.....	II-105
Tabel 2. 28: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pertanahan	
Tahun Anggaran 2021.....	II-110
Tabel 2. 29: Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kearsipan	
Tahun Anggaran 2021.....	II-111
Tabel 2. 30: Realisasi Pelaksanaan Program Unsur penunjang Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021	II-112
Tabel 2. 31: Realisasi Pelaksanaan Program Unsur penunjang Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021	II-122
Tabel 2. 32: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Selatan	
Tahun Anggaran 2021.....	II-127
Tabel 2. 33: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Arut Utara	
Tahun Anggaran 2021.....	II-132
Tabel 2. 34: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kumai	
Tahun Anggaran 2021.....	II-136
Tabel 2. 35: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Kotawaringin Lama	
Tahun Anggaran 2021.....	II-141
Tabel 2. 36: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Banteng	
Tahun Anggaran 2021.....	II-146

Tabel 2. 37: Realisasi Pelaksanaan Kecamatan Pangkalan Lada Tahun Anggaran 2021.....	II-150
Tabel 2. 38: Realisasi Pelaksanaan Program Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2021.....	II-154
Tabel 2. 39: Realisasi Urusan Penunjang Perencanaan Tahun Anggaran 2021.....	II-157
Tabel 2. 40: Realisasi Unsur Penunjang Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021.....	II-164
Tabel 2. 41: Realisasi Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun Anggaran 2021.....	II-173
Tabel 2. 42: Realisasi Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021.....	II-178
Tabel 2. 43: Realisasi Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2021.....	II-179
Tabel 2. 44: Realisasi Unsur Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2021.....	II-180
Tabel 3. 1: Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2020	III-2
Tabel 3. 2: Persentase Distribusi PDRB ADHB berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2020.....	III-4
Tabel 3. 3: Persentase Pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Kotawaringin Barat 2016-2020	III-5
Tabel 3. 4: Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2020	III-13
Tabel 3. 5: Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021	III-14
Tabel 3. 6: Rata-Rata Belanja Daerah 2016-2020 Kabupaten Kotawaringin Barat	III-18
Tabel 3. 7: Proyeksi Perubahan Belanja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021	III-19
Tabel 3. 8: Realisasi Pembiayaan Daerah 2017-2020.....	III-21
Tabel 3. 9: Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah 2021	III-21
Tabel 3. 10: Rencana Kerangka Pendanaan Daerah Berdasarkan Urusan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021	III-22
Tabel 4. 1: Penjabaran Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.....	IV-3
Tabel 4. 2: Program Prioritas Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2021	IV-11
Tabel 4. 3: Pergeseran Alokasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021.....	IV-14

Tabel 4. 4: Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah Tahun 2021.....	IV-25
Tabel 4. 5: Penanganan Permasalahan Pernikahan dini (atau usia dibawah 18 tahun) Stunting dan Kemiskinan Tahun 2021	IV-26
Tabel 4. 6: Rencana Optimalisasi Penggunaan Sisa Dana Bagi Hasil.....	IV-27
Tabel 4. 7: Inovasi Program Permasalahan Optimalisasi Ekonomi Kreatif, Ketahanan pangan dan UMKM.....	IV-27
Tabel 4. 8: Penanganan Infrastruktur Dasar Permukiman (Pembangunan Perumahan Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi)	IV-27
Tabel 4. 9: Biaya Pembuatan Mesin Chopper 30 PK.....	IV-36
Tabel 4. 10: Spesifikasi Mesin Chopper 30 PK	IV-36
Tabel 4. 11: Biaya Produksi Mesin Chopper 30 PK di dalam pengolahan Cocopeat.....	IV-37
Tabel 5. 1: Rekapitulasi Rencana Anggaran Belanja Langsung PD Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021	V-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-8
Gambar 3. 1: Perbandingan PDRB ADHB, ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	III-2
Gambar 3. 2: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional 2016-2020	III-3
Gambar 3. 3: Perkembangan Kasus COVID-19 Nasional Kalimantan Tengah	III-7
Gambar 3. 4: Perkembangan Kasus COVID-19 Kalimantan Tengah.....	III-7
Gambar 3. 5: Perkembangan Kasus COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-7
Gambar 3. 6: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin barat 2016-2020, Target 2021 dan Target 2021	III-8
Gambar 3. 7: Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016-2020	III-14
Gambar 4. 1: Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK	IV-35
Gambar 4. 2: Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK (Tampak Muka).....	IV-35
Gambar 4. 3: Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK (Tampak Belakang)	IV-35
Gambar 4. 4: Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK (Tampak Samping)	IV-36
Gambar 4. 5: Rancang Bangun Mesin Chopper 30 PK (Tampak Atas)	IV-37
Gambar 4. 6: Cocofiber	IV-39
Gambar 4. 7: Cocopeat	IV-39
Gambar 4. 8: Contoh Produk dari Hasil Turunan Pot Bunga	IV-39



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas perkenan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Sesuai fungsinya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen rencana untuk perubahan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun berjalan dan menjadi pedoman dalam proses Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS serta Perubahan RAPBD. Untuk itu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021.

Pangkalan Bun, 30 Juli 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



HJ. NURHIDAYAH, S. H., M. H.



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah dan selaras kebijakan perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, salah satunya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran, yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka RKPD sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah dievaluasi secara periodik dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dapat dilakukan perubahan RKPD.

Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Selain itu, terdapat perubahan peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat yang mengamanatkan untuk ditindaklanjuti, yakni :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/544/SJ tanggal 1 Februari 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Perubahan peraturan terkait pengelolaan tersebut telah diakomodasi melalui dilaksanakannya *refocusing* dan realokasi dana transfer daerah untuk mendukung penanganan pandemi *Covid-19* di daerah.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap amanat peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat tersebut, telah dilakukan pula penyesuaian APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, sehingga Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyesuaian-penyesuaian terkait rencana pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, yang kemudian akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2021.

Secara substantif, perumusan rancangan perubahan RKPD meliputi penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target dan sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/ atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, serta target penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), dimana substansi lingkup perumusan rancangan perubahan renja perangkat daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590)
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya.

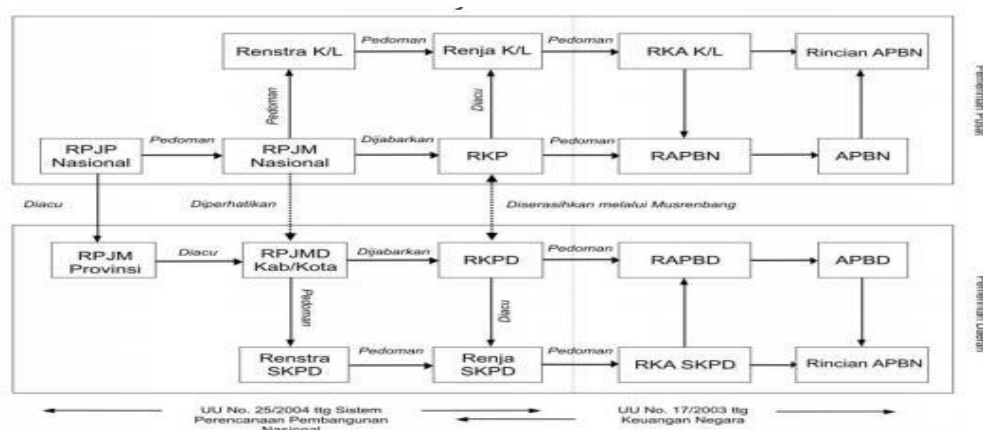
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
42. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor)
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006, Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
50. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9);
51. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 47);

1.3. Sinergi Antar Dokumen

RKPD disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, sebagaimana tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, termuat visi dan misi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta tema pembangunan tahun 2021 yakni “Penguatan Kontribusi Sektor Pertanian Terpadu, Industri Pengolahan, Dan Kepariwisata Terhadap Pendapatan Daerah”. Tema pembangunan ini dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagai pedoman prioritas pembangunan daerah tahun 2021. Selanjutnya, RKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja setiap perangkat daerah (Renja-PD).

Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam hal RKPD mengalami perubahan karena sebab-sebab tertentu, maka terhadap Renja Perangkat Daerah juga wajib dilakukan penyesuaian. Dokumen perubahan renja perangkat daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
- c. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
- d. Penutup.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2021, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja SKPD Tahun 2021, sesuai dengan rencana program prioritas pada dokumen awal RKPD Tahun 2021.
2. Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Perubahan RKPD 2021.
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja PD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2021.

- b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, yang selaras dengan perkembangan kondisi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Visi dan Misi Pembangunan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran
- 4.3. Arah Kebijakan Pembangunan
- 4.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021
- 4.5. Penanganan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 4.6. Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

- A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**, meliputi: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial.
- B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**, meliputi: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan dan Kearsipan.
- C. Urusan Pilihan**, meliputi: Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi.
- D. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; serta Penelitian dan Pengembangan;
- E. Unsur Kewilayahan**, meliputi Kecamatan; dan
- F. Unsur Pemerintahan Umum** yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Belanja Langsung (BL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan berbagai urusan yang tertuang dalam program kegiatan pembangunan tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.493.562.239.681,00 dengan realisasi anggaran pada akhir Triwulan II sebesar Rp.515.898.995.910,19 atau 34,54% dan realisasi fisik sebesar 38,62%. Selengkapnya, berkenaan dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 313.486.526.951,00 dan terealisasi sebesar Rp.111.160.554.186,00 atau 35,46% serta realisasi fisik sebesar 39,74%. Adapun realisasi anggaran urusan pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%			214.361.296.643	107.105.540.944	49,96	56,93
	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penggabungan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen			169.739.850	27.265.703	16,06	28,87
	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	1	30.835.000	10.360.000	33,60	44,00
	1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	57.172.000			
	1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	3.111.900			
	1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	9.999.750			100
	1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	3.685.000			
	1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	2	1	5.462.950			12
	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	59.473.250	16.905.703	28,43	42
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen			212.826.253.142	106.766.482.268	50,17	57,13
	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	1.891		212.703.323.592	106.728.769.898	50,18	57,14
	1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	3	1	115.721.300	37.712.370	32,59	40,00
	1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen/ Laporan	2	1	7.208.250			
	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Dokumen			17.681.950	-	-	-
	1.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dinilai	Unit	1	-	17,681,950			

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD yang diawasi	Unit			-			
	1.01.01.2.05 Administrasi Kpegawain Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawain yang disediakan	Jenis			42,674,050	9,910,600	23.22	23.55
	1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	100	-	9,177,050			
	1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Orang	3	1	33,497,000	9,910,600	30	30.00
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis			357.423.900	34.790.657	9,73	18,57
	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	15	-	9.156.829		-	
	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	4	4	65.242.677		-	
	1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis			-			
	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jenis	60	60	2.000.000		-	
	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	lembar	122.609	81.373	77.354.394	7.842.450	10,14	20,00
	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kegiatan	58	34	203.670.000	26.948.207	13,23	25,00
	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	4	-	721,799,751	239,931,716	33.24	50.00
	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	29	-	304,907,740	74,118,290	24.31	50.00
	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jenis	1	-	416,892,011	165,813,426	39.77	50.00
	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	12	7	225,724,000	27,160,000	12.03	13.43
	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1	0,25	17.985.900				1

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	45	30	150.968.100	19.110.000	12,66	15,00	45
	1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45	23	56.770.000	8.050.000	14,18	15,00	45
	1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhab/dipelihara	1	-	-				1
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase PAUD terakreditasi A		45	23	93,911,507,038	4,055,013,242	87.12	2.10
		Persentase kelulusan PAUD		1	-				
		Persentase SD terakreditasi A							
		Persentase kelulusan SD							
		Persentase SMP terakreditasi A							
		Persentase kelulusan Kejar paket							
		Persentase kelulusan SMP							
	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK/APM SD				60,427,481,947	639,500,000	2.41	
	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru	unit	8	-	1.490.836.522			
	1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/KS/TU yang dibangun	unit	6	-	816.097.888			
	1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang dibangun	unit	1	-	96.700.000			
	1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang dibangun	unit	5	-	1.155.868.000			
	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas yang dibangun	jenis	4	-	3.847.847.041			
	1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas KS/guru/penjaga yang dibangun	unit	7	-	966.667.151			
	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab	unit	46	-	3.037.426.800			
	1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/KS/TU yang direhab	unit	6	-	648.552.600			
	1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhab	unit	3	-	281.604.000			
	1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas yg direhab	jenis	4	-	282.960.000			
	1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas KS/guru/penjaga yang direhab	unit	1	-	112.124.451			
	1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeler	unit	1.184	-	2.394.550.000			

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa	stel	5.200		3.120.000.000			
	1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah biaya personil peserta didik SD	sekolah	167		515.279.184			
	1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan peraga	jenis	12		9.793.568.160			
	1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta ujian	Kegiatan	2	1	301.312.730			
	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kretativitas Siswa	Jumlah lomba siswa berprestasi	kegiatan	2	2	137.986.020			
	1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	orang	430	230	2.580.000.000	639,500,000	24.79	50.00
	1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta pelatihan	orang	124	-	-			
	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	Kegiatan sekolah	18 15	12	33.095.000			
	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah alokasi siswa yang mendapat dana bos	siswa	5.200	-	26.811.860.000			
	1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah laboratorium yang dibangun	unit	9	-	2.003.146.400			
	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK/APM SMP		-	-	25,287,180,301	327,000,000	1.29	2.46
	1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru	unit	unit	1	-			
	1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/KS/TU yang dibangun	unit	unit	1	-			
	1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas KS/guru/penjaga yang dibangun	unit	unit	2	-			
	1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas yang dibangun	jenis	jenis	3	-			
	1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	unit	ruang	15	-			
	1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhab	unit	ruang	2	-			
	1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhab	unit	unit	1	-			
	1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeler	unit	buah	160	-			
	1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa	stel	5.210	5.210	3.126.000.000			

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah biaya personil peserta didik SMP	sekolah	739	-	3.214.992.940			
	1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan peraga	unit	17	-	1.052.100.000			
	1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta ujian	kegiatan	4	4	156.890.000			
	1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan tindak lanjut evaluasi	kegiatan	2	1	30.710.000			
	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba siswa berprestasi	Kegiatan	2	2	53.728.012			
	1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	orang	218	218	1.308.000.000	327.000.000	25,00	50,00
	1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta pelatihan	orang	40	-	-			
	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	sekolah	10	-	21.000.000			
	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah alokasi siswa yang mendapat dana bos	siswa	10.598	10.598	11.478.540.000			
	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK/APM PAUD		-	-	6,879,826,800	2,461,037,742	35.77	42.75
	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang dibangun	unit	4	-	502.300.000			15,00
	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarpras dan utilitas yang dibangun	jenis	4	-	548.495.000			15,00
	1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD yang direhab	unit	1	-	110.294.100			15,00
	1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel	unit	4	-	11.999.900			-
	1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah biaya personil peserta didik SMP	sekolah	5	5	64.349.680	15.155.742	23,55	23,00
	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktek dan peraga	unit	5	-	45.000.000			
	1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta ujian	kegiatan	2	-	-			
	1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah kegiatan tindak lanjut evaluasi	kegiatan	1	-	5.590.000			
	1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta pelatihan	orang	230	-	-			

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah sekolah yang dibina	sekolah	1	1	99.998.120	3.882.000	3,88	4,00
	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah alokasi siswa yang mendapat dana bos	lembaga/sekolah	168	140	5.491.800.000	2.442.000.000	44,47	50,00
	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelola pendidikan nonformal/kesetaraan	lembaga	-	-1	1,317,017,990	627,475,500	47,64	47,71
	1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta pendidikan nonformal/kesetaraan	orang	546	21	65.517.990	2.425.500	3,70	4,00
	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	waktu alokasi penyediaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	siswa	580	240	1.251.500.000	625.050.000	49,94	50,00
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum yang dikembangkan	%	-	-	-			
	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum mulok pendidikan dasar yang ditetapkan	jenis			-			
	1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta kegiatan penyusunan mulok pendidikan dasar	kegiatan	1	-	-			
	1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kurikulum mulok PAUD dan pendidikan nonformal yang ditetapkan	jenis			-			
	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah peserta kegiatan penyusunan mulok PAUD dan pendidikan non formal	kegiatan	1	-	-			
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang telah tersertifikasi	%			5,213,723,270			
	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang telah dilatih	orang	-	-	5,213,723,270	1,458,439,631	27,97	50,00
	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen perhitungan dan pemetaan	orang	100	70	33.199.750			50,00
	1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	kegiatan	7	4	5.180.523.520	1.458.439.631	28,15	50,00
	TOTAL					313,486,526,951	111,160,554,186	35,46	39,74
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)		%						

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada Urusan Pendidikan adalah sebesar 39.74, atau masuk kategori **Sangat Rendah**

Dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan dituangkan kembali dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengalokasikan anggaran melalui perubahan anggaran untuk memenuhi perlengkapan dasar peserta didik Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi peserta didik baru yaitu berupa perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru. Pemenuhan Perlengkapan dasar peserta didik Pendidikan Kesetaraan yaitu paket modul belajar sesuai dengan kurikulum melalui BOP Kesetaraan.

Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 dalam upaya peningkatan Angka Rata - rata Lama Sekolah (RLS) dengan langkah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan sarana pendukung kegiatan pendidikan non formal berupa ruang kelas baru dan ruang utilitas lainnya yang dibangun di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Meningkatkan sarana pembelajaran / teknologi informasi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) swasta.
3. Melakukan sosialisasi tentang pendidikan kesetaraan kepada masyarakat serta mendorong penduduk di atas usia 25 tahun yang rata rata pendidikannya SMP untuk melanjutkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan.
4. Mendorong SPNF dan PKBM yang ada untuk bekerja sama dengan pemerintah desa guna meningkatkan SDM aparatur desa/ warga desa yang belum berpendidikan sampai dengan SMA/ sederajat melalui program kesetaraan paket A, B dan C.
5. Mendorong pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk membuka dan mengembangkan PKBM ditingkat desa mengingat jumlah PKBM yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya 8 (delapan) PKBM swasta dan 1 (satu) SPNF negeri.
6. Mendorong PKBM swasta untuk bekerja sama dengan SD/SMP/SMA terdekat dilingkungannya untuk melacak siswa yang putus sekolah dan menyelamatkan dengan melanjutkan Pendidikan melalui program kesetaraan (paket A/B/C).
7. Membuat aplikasi SIAPTARA yang merupakan aplikasi untuk mempermudah pendaftaran Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam upaya peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mengupayakan penyediaan fasilitas pendidikan tingkat menengah dan sekolah tinggi/universitas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat (Universitas Antakusuma, Stikes dan STITNA). Hal tersebut sesuai pembagian kewenangan, yakni Pendidikan Menengah

(SMA/SMK/SLB) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan Pendidikan Tinggi (Sekolah Tinggi/Universitas) merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan sejumlah langkah sebagai upaya pemerintah dalam mendukung pembelajaran daring baik sarana prasarana maupun operasionalnya. Langkah tersebut diakomodasi dalam nomenklatur kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), meliputi:

- Penyiapan system pendaftaran online pendidikan kesetaraan melalui siaptarakotawaringinbaratkab.go.id dan pemanfaatan secara Daring untuk PBM pendidikan kesetaraan.
- Untuk PAUD melalui penguatan kompetensi guru dalam pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan memaksimalkan sumber dan bahan belajar yang sudah ada melalui Panel Pendidikan/ Rumah Belajar tayangan TVRI untuk pendidikan melalui sosialisasi dan pelatihan baik secara Daring dan Luring.
- Pemerintah telah memberikan bantuan kuota data internet kepada seluruh siswa baik PAUD, SD, SMP maupun SMA dan SMK (Persetjen No. 4 Tahun 2021 tanggal 1 maret 2021). Disamping itu sekolah juga diberikan kelonggaran penggunaan dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) regular untuk penanggulangan penyebaran Covid-19. Serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang di dalam pembelajaran secara daring seperti pemasangan jaringan internet agar sekolah dapat terkoneksi dengan jaringan internet.
- Pembayaran langganan daya/ jasa internet untuk sekolah-sekolah yang sudah ada jaringan internet.
- Bantuan paket data kepada guru-guru yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemendikbud.

Seiring dengan program prioritas nasional, dimana pada bulan September direncanakan akan dilakukan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut, meliputi:

1. Sosialisasi Asesmen Nasional untuk Kepala Sekolah SD di 6 kecamatan.
2. Pelatihan Operator Asesmen Nasional untuk SD se-Kobar.
3. Perjalanan dinas Monev Asesmen Nasional SD ke 6 kecamatan.
4. Perjalanan dinas Verifikasi dan Validasi Infrastruktur TIK dalam rangka persiapan Asesmen Nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) sekobar.
5. Pelatihan dan sosialisasi tahap I untuk proktor ANBK SMP/MTs se-Kobar.
6. Pelatihan dan sosialisasi tahap II untuk proktor ANBK SMP/MTs se-Kobar.
7. Monev Pelaksanaan ANBK seluruh kecamatan.
8. Perjalanan dinas persiapan pelaporan hasil Asesmen Nasional (AN) ke pusat
9. Verifikasi dan validasi TIK via aplikasi dengan memaksimalkan peran proktor ANBK SMP/MTs se-Kobar.

Sementara itu, dalam rangka peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan diklat secara daring dan luring meliputi:

1. Diklat Calon Kepala Sekolah (Cakep)
2. Diklat Penguatan Kepala Sekolah (Kepsek) secara Daring
3. Seleksi Calon Pengawas (Cawas)
4. Diklat Calon Pengawas (Cawas) secara Daring

2.2. Urusan Kebudayaan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kebudayaan diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp2.588.960.591,00 dan terealisasi sebesar Rp.341.414.500 atau 13,19%. Adapun realisasi anggaran urusan kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
	02.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya yang dikembangkan dan dilestarikan	%			1,476,789,941			
	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku budaya/budayawan	orang			852,349,711	339,134,500	39.79	50.00
	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah obyek budaya yang dilindungi dan dikembangkan	jenis	7	-	-			-
	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pelaku SDM, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina	orang	12	6	852,349,711	339,134,500	39.79	50.00
	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	jenis			624,440,230			
	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah tradisi budaya yang dilindungi dan dikembangkan	jenis	2	-	138,500,000			
	2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan pranata tradisional yang dibina	orang	2	1	4,020,000			
	2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pihak yang berprestasi dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan	orang	11	0	733,966,230			

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%			1,112,170,650			
	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya	unit			1,112,170,650	2,280,000	0.21	0.21
	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	unit	2	-	1,112,170,650	2,280,000	0.21	0.21
	TOTAL					2.588.960.591	341.414.500	13.19	25.54
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)		%						

Dari rata-rata capaian kinerja pada Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, maka rata-rata capaian kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebesar 25.54 %, atau masuk kategori **Sangat Rendah**

2.3. Urusan Kesehatan Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.160,088,432,766,00 untuk Dinas Kesehatan dan Rp.273,072,731,386.00 untuk RSUD Sultan Imanudin. Dari alokasi tersebut alokasi pada Dinas Kesehatan terealisasi sebesar Rp. 40.132.235.184.00 dan RSUD Sultan Imanudin mencatat realisasi sebesar Rp.89,986,380,442.00 atau 32,95% serta realisasi fisik sebesar 35,13%. Adapun realisasi anggaran urusan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Realisasi Program Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					160,088,432,766	40.132.235.184	25,07	31,75
1	1.2.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	49,50	57.565.415.730	26.865.214.055	46,67	49,50
	1.2.1.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persen	100	25,00	103.659.800	19.284.000	18,60	25%

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Keuangan							
	1.02.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	3	2	56,100,000	19,284,000	34.37	0.40
	1.02.01.2.01.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen RKA	Kegiatan	3	2	10,904,900	-	-	0.15
	1.02.01.2.01.03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	4	3	10,865,000	-	-	0.15
	1.02.01.2.01.04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen DPA	Kegiatan	3	2	7,672,500	-	-	0.15
	1.02.01.2.01.05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen DPA Perubahan	Kegiatan	4	3	7,672,500	-	-	0.15
	1.02.01.2.01.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Kegiatan	1	-	3,844,900	-	-	0.15
	1.02.01.2.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	kategori	A	CC	6,600,000	-	-	0.15
	1.2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan	%	100	50	55,585,865,711	26,273,168,932	47.27	0.50
	1.02.01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan untuk 493 ASN selama 12 ulan	Bulan	12	6	55,103,010,161	26,083,599,720	47.34	0.50
	1.02.01.2.02.03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengujian dokumen keuangan	dokumen	5000	1200	472,026,000	183,689,412	38.92	0.45
	1.02.01.2.02.04. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi akuntansi	kali	0	0	-	-	-	0.15
	1.02.01.2.02.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,879,800	3,500,000	59.53	0.65
	1.02.01.2.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	laporan	2 Laporan	2 Laporan	4,949,750	2,379,800	48.08	0.55
	1.2.1.2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketertiban administrasi BMD	%			27,960,000	4,376,000	15.65	0.20
	1.02.01.2.03.02. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diamankan	Unitt	16	6	19,940,000	4,376,000	21.95	0.27
	1.02.01.2.03.04. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD	Laporan	6	3	8,020,000	-	-	0.15
	1.2.1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketertiban administrasi kepegawaian	%	100		60,850,000	1,098,000	1.80	0.15
	1.02.01.2.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Stel	0	0	-	-	-	0.15
	1.02.01.2.05.05. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monev dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	3	2	3,940,000	1,098,000	27.87	0.35

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.02.01.2.05.06. Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	orang	0	0	-	-	-	-
	1.02.01.2.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	4	0	56,910,000	-	-	0.15
	1.2.1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan kebutuhan administrasi umum	%			454,644,365	107,832,532	23.72	0.30
	1.02.01.2.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen yang dibutuhkan	Unit	19	19	7,994,360	7,952,000	99.47	1.00
	1.02.01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	17	17	113,119,985	-	-	0.15
	1.02.01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis	21	21	15,221,760	15,149,500	99.53	1.00
	1.02.01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik	Jenis	3	4	4,970,000	-	-	0.15
	1.02.01.2.06.05. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	Lembar	236488	138982	131,198,260	48,643,550	37.08	0.43
	1.02.01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	18	8	182,140,000	36,087,482	19.81	0.25
	1.2.1.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	Jenis			107,757,441	-	-	0.35
	1.02.01.2.07.05. Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Buah	13	0	23,760,000	-	-	0.35
	1.02.01.2.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	10	4	83,997,441	-	-	0.35
	1.2.1.2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang	jenis			948,349,956	418,665,091	44.15	0.47
	1.02.01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen	paket	17	4	595,000	-	-	0.15
	1.02.01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	6	573,306,956	288,655,807	50.35	0.55
	1.02.01.2.08.03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan peralatan kantor	Jenis	0	0	-	-	-	0.15
	1.02.01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	6	374,448,000	130,009,284	34.72	0.40
	1.2.1.2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah BMD yang dipelihara	Jenis			276,328,457	40,789,500	14.76	0.15
	1.02.01.2.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan operasional dibayar pajak sesuai kebutuhan	Unit	5	5	32,485,387	1,020,500	3.14	0.15
	1.02.01.2.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis	6	6	126,546,000	39,769,000	31.43	0.36
	1.02.01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang di bangun	unit	1	1	84,099,125	-	-	0.15

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.02.01.2.09.10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung yang dipelihara/rehab	jenis	13	13	14,999,105	-	-	0.15
	1.02.01.2.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung yang dipelihara/rehab	unit	1	1	18,198,840	-	-	0.15
2	1.2.2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Angka Kematian Ibu	per 100000 KH	120	340	86,089,646,189	7,435,521,948	8.64	10.00
		- Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	20	5				
		- Prevalensi stunting	%	26	11.47				
		- Presentase desa/kelurahan siaga alat	%	85	31				
	1.2.2.2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah faskes pelayanan UKM dan UKP yang dibangun dan direhab	Unit			33,263,561,040	73,590,395	0.22	0.35
	1.02.02.2.01.02. Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	Unit	6	0	690,000,000	4,202,000	0.61	0.35
	1.02.02.2.01.03. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah faskes lainnya yang dibangun	Unit	8	4	884,999,800	19,196,400	2.17	1.20
	1.02.02.2.01.06. Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dikembangkan	Unit	2	0	13,831,999,950	-	-	-
	1.02.02.2.01.09. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab/dipelihara	Unit	1	1	350,000,000	4,202,000	1.20	0.35
	1.02.02.2.01.10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah faskes lainnya yang direhab/dipelihara	Unit	20	6	1,994,970,000	27,593,995	1.38	0.35
	1.02.02.2.01.13. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan ambulance atau pusling	Unit	14	1	4,229,512,000	-	-	0.35
	1.02.02.2.01.14. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan Puskesmas, Pustu, polindes, poskesdes, dan RS yang diadakan	Jenis			5,797,531,245	-	-	0.35
	1.02.02.2.01.16. Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yg tersedia	jenis	40	5	1,656,911,330	18,396,000	1.11	0.15
	1.02.02.2.01.17. Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah bahan pakai habis	jenis	200	28	3,526,545,583	-	-	0.35
	1.02.02.2.01.19. Pemeliharaan Prasarana Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana yankes yang dipelihara	Unit	18	6	116,491,582	-	-	0.15
	1.02.02.2.01.20. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes/alat penunjang medik fasyankes yang dipelihara	Unit	1	0	184,599,550	-	-	0.15
	1.2.2.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan yang disediakan				52,686,294,717	7,341,627,103	13.93	0.20
	1.02.02.2.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	48.23	242,409,000	51,350,100	21.18	0.25
	1.02.02.2.02.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	%	100	50.11	1,170,316,950	266,441,004	22.77	0.28

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							(Rp.)	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bersalin								
	1.02.02.2.02.03. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	51.96	90,000,300	2,999,000	3.33	0.15
	1.02.02.2.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	44.78	278,484,000	-	-	0.15
	1.02.02.2.02.05. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	54.7	59,999,750	1,337,750	2.23	0.15
	1.02.02.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	%	100	27.4	47,374,000	-	-	0.15
	1.02.02.2.02.07. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	%	100	50.42	39,999,990	2,084,000	5.21	0.15
	1.02.02.2.02.08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan kesehatan Hipertensi	%	100	50	133,498,923	-	-	0.35
	1.02.02.2.02.09. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan DM	%	100	48	137,794,875	-	-	0.35
	1.02.02.2.02.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODGJ	%	100	91	99,940,000	22,941,600	22.96	0.28
	1.02.02.2.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan TB Paru	%	100	100	82,600,000	-	-	0.15
	1.02.02.2.02.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	100	259,795,760	34,243,304	13.18	0.22
	1.02.02.2.02.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	32	6,935,803,000	8,319,700	0.12	
	1.02.02.2.02.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Penderita gizi kurang dan buruk mendapat PMT pemulihan	orang	3	3	415,212,140	10,000,000	2.41	0.15
	1.02.02.2.02.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	puskesmas	15	10	70,486,180	1,778,000	2.52	0.15
	1.02.02.2.02.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan lingkungan	%	100	41	547,629,695	41,698,500	7.61	0.23
	1.02.02.2.02.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Media promosi kesehatan yang dicetak	jenis	4	2	71,442,716	17,875,000	25.02	0.30
	1.02.02.2.02.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pelayanan Kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	%	100	18	59,518,500	22,421,500	37.67	0.45
	1.02.02.2.02.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan teknis surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah 2 kali 18 Puskesmas.	kali	35	35	159,978,700	29,462,700	18.42	0.25
	1.02.02.2.02.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa	%	100	-	-	-	-	-
	1.02.02.2.02.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	-	27,694,000	-	-	0.15
	1.02.02.2.02.23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan skrining	Calon Jemaah Haji	0	0	240,825,640	-	-	0.15

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kesehatan							
	1.02.02.2.02.25. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Imunisasi Dasar Lengkap	%	95	60.98	291,319,000	26,009,400	8.93	0.20
	1.02.02.2.02.26. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang tercover Jaminan kesehatan				10,176,424,850	3,838,972,900	37.72	0.45
	1.02.02.2.02.27. Deteksi Dini Fasyankes dan Sekolah	Jumlah pelaksanaan deteksi dini		-	-		-	-	-
	1.02.02.2.02.29. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase meningkatnya penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	%	66	21.3	342,282,027	-	-	0.35
	1.02.02.2.02.32. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah RS yang mendapatkan operasional kesehatan	Unit	1	0	1,652,699,561	-	-	
	1.02.02.2.02.33. Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan operasional kesehatan	puskes mas	18	18	28,000,525,159	2,954,983,895	10.55	0.20
	1.02.02.2.02.34. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase peningkatan kapasitas pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	%	80	80	83,000,000	8,708,750	10.49	
	1.02.02.2.02.35. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Puskesmas yang terakreditasi	puskes mas	18	15	943,340,001	-	-	0.15
	1.02.02.2.02.37. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah pelaksanaan respon wabah	laporan	52	33	25,900,000	-	-	0.15
	1.2.2.2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yg teintegrasi	Unit			43,627,482	5,040,000	11.55	0.20
	1.02.02.2.03.01. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang membuat profil kesehatan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	puskesmas	18	0	18,547,482	-	-	0.15
	1.02.02.2.03.01. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan	Unit	18	9	25,080,000	5,040,000	20.10	0.15
	1.2.2.2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin RS dan Faskes yg diterbitkan	unit			96,162,950	15,264,450	15.87	0.15
	1.02.02.2.04.02. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS dan Fasyankes yg meningkat tata kelolanya	unit	11	11	10,275,000	-	-	0.15
	1.02.02.2.04.03. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	%	100	45	28,212,950	12,208,450	43.27	0.26
	1.02.02.2.04.04. Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Puskesmas yang kesehatan rujukannya berstandart	%	100	50	57,675,000	3,056,000	5.30	0.15
3	1.2.3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan lengkap	Puskes mas	18	15	15,959,246,250	5,806,619,181	36.38	0.55
	1.2.3.2. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah izin prkatek nakes yg diterbitkan	dokumen	250	190	7,500,000	2,420,000	32.27	0.75

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
							Rp	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.02.03.2.01.02. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan nakes	laporan	5	3	7,500,000	2,420,000	32.27	0.70
	1.2.3.2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesehatan untuk UKP dan UKM	orang	12	6	15,913,281,875	5,804,199,181	36.47	0.50
	1.02.03.2.02.02. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga kesehatan yang mengikuti seleksi Tingkat Propinsi	orang	0	0	15,903,611,875	5,801,449,181	36.48	0.50
	1.02.03.2.02.03. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen PAK yang diterbitkan	dokumen	30	23	9,670,000	2,750,000	28.44	0.35
	1.2.3.2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya peningkatan kompetensi SDM kesehatan	kegiatan	1	0	38,464,375	-	-	0.15
	1.02.03.2.03.01. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesehatan yg dilatih	orang	40	127	38,464,375	-	-	0.15
4	1.2.4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alkes dan makan minuman sesuai standar				104,324,734	3,250,000	3.12	0.15
	1.2.4.2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri RT yang mendapatkan sertifikat	unit	70	-	75,217,147	3,250,000	4.32	-
	1.02.04.2.02.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT yang mendapat pembinaan dan pengawasan	unit	70	-	8,127,147	3,250,000	39.99	0.45
	1.02.04.2.02.02. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal serta UMOT yg diterbitkan	izin	36	60	67,090,000		-	-
	1.2.4.2.06. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah izin dan sertifikat yang diterbitkan				29,107,587		-	

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK
						Rp	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.2.4.2.06.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel yang diperiksa	unit	50	-	8,127,147		-	
	1.2.4.2.06.01. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase masyarakat yg terlibat dalam upaya kesehatan	%			9,785,000	-	-	0.15
	1.2.4.2.06.02. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah advokasi dan kemitraan yang dilaksanakan				705,220	-	-	0.15
5	1.2.5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yg terlibat dalam upaya kesehatan	persen	75	15	388,417,230	21,630,000	5.57	0.15
	1.2.5.2. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah advokasi dan kemitraan yang dilaksanakan	orang	220	0	322,540,380	-	-	0.15
	1.02.05.2.01.01. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang diberi edukasi tentang penggunaan obat dan alat kesehatan yang benar	peserta	220	0	322,540,380	-	-	0.15
	1.2.5.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan upaya promotif dan preventif	jenis	4	3	36,596,850	7,214,000	19.71	0.25
	1.02.05.2.02.01. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penyuluhan Kesehatan dalam mendukung Kampanye Germas dan PHBS	Kali	12	9	36,596,850	7,214,000	19.71	0.25
	1.2.5.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa siaga yang aktif	desa	15	5	29,280,000	14,416,000	49.23	0.55
	1.02.05.2.03.01. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Monitoring UKBM dalam Upaya Pengembangan Desa Siaga Aktif dan Posyandu Holistik Masyarakat (UKBM)	desa	15	5	29,280,000	14,416,000	49.23	0.55
	JUMLAH					160,088,432,766	40,132,235,184	25.07	31.75
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)							

Tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Kesehatan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 31,75%, yang termasuk kategori sangat rendah.

a. Pencapaian target pada indikator SPM bidang kesehatan

Terkait capaian indikator SPM, seluruh indikator SPM Bidang Kesehatan, (terdapat 12 indikator), Siklus Hidup serta penanganan penyakit menular dan tidak menular untuk tahun 2021 telah dimuat pada Renstra dan Renja PD Tahun 2021. Sementara untuk SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2020 capaiannya dibawah 60%, disebabkan hal sebagai berikut:

- Pencapaian Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar hanya 34 %, hal ini disebabkan pada awal triwulan I kegiatan ini mulai dilaksanakan karena masih pre pandemi dengan penetapan Situasi Tanggap Darurat sejak 31 Maret 2020 kegiatan sekolah tatap muka dihentikan. Dengan kondisi sistem pembelajaran online maka kegiatan penjarangan/pemeriksaan pada siswa baru tidak mungkin dilaksanakan dan ada upaya untuk melakukan penjarangan dengan terjadwal ketat dengan prokes telah menjangkau Sebagian siswa. Setelah kondisi kasus COVID-19 meningkat tajam kegiatan tersebut tidak maksimal dan focus dalam penanganan covid-19 sehingga hanya mencapai 34 %.
- Hal tersebut juga terjadi pada pelayanan usia produktif hanya 29 %, disebabkan pada masa pandemi dengan gelombang kasus Covid-19 yang sangat tinggi aktifitas kegiatan masyarakat yang bersifat UKBM di hetikan sementara dengan mempertimbangkan Kesehatan dan keselamatan masyarakat dan focus pada tatanan penanganan pandemic. Kondisi tersebut ditambah dengan adanya refocusing yang berdampak pada pergeseran anggaran untuk penanganan Covid -19 termasuk anggaran SPM pada kegiatan tersebut.

b. Percepatan penurunan prevalensi stunting

Angka prevalensi stunting di Kotawaringin Barat didapat melalui beberapa sumber yang dimulai pada tahun 2018 melalui Riskesdas, tahun 2019 menggunakan SSGBI dan tahun 2020 e-PPGBM. Data Rsikesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2018 : 22,07 % ini adalah hasil stunting berdasarkan riset Kesehatan dasar tahun2018 dengan metode sampling per kabupaten, dengan data sebagai berikut:

- Data SSGBI (Survei Status Gizi Balita Indonesia) tahun 2019 : 23,98% dari sampling balita pada kegiatan SSGBI dengan jumlah balita sampel sebanyak 84 balita dari 570 rumah tangga yang di survey.
- Data e-PPGBM 2020 : 15,0% berdasarkan data jumlah balita yang di ukur saat kegiatan di posyandu, data ini belum disesuaikan dengan data masukan jumlah balita pada aplikasi e-PPGBM, yang seharusnya mencapai 80%. Capaian sementara masih 40% dari total balita yang ada di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat.
- Data *stunting* kabupaten berdasarkan e-PPGBM mencapai 15,0% sudah termasuk kategori baik, meskipun berada di bawah target nasional pada tahun 2020 yaitu 24,1%. Angka capaian tersebut belum disesuaikan dengan hasil pengukuran balita yang diinput ke aplikasi e-PPGBM. Sehingga apabila hasil pengukuran balita mencapai telah disesuaikan, maka angka stunting berubah bisa lebih rendah dari 15,0% atau lebih tinggi.

c. Program PIS – PK di Kabupaten Kotawaringin Barat telah sampai pada tahap menyelesaikan proses pendataan. Pengelolaan data sudah dilakukan secara terpadu dalam bentuk aplikasi

spreadsheet, sehingga bisa diakses oleh berbagai pihak untuk melakukan tindak lanjut intervensi dan digunakan dalam pengambilan kebijakan sesuai skala prioritas.

- d. Germas tetap dilaksanakan, terlebih pada masa pandemi ini, secara spesifik protokol Kesehatan diterapkan sebagai salah satu upaya pencegahan Covid-19.

Sebagai langkah percepatan penanganan pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya pada tatanan teknis, meliputi pengendalian penyakit menular (pelaksanaan protokol kesehatan), *testing, tracing* dan *treatment*.

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				35,13	273.072.731.386	89.986.380.442	32,95	35,13
1	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	43,22	157.435.352.065	67.903.113.635	43,13	43,22
	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disediakan	Jenis	1	0	6.500.000	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	6	1	6.500.000	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang disediakan	jenis	2	0	36.329.070.265	17.281.071.299	47,57	47,57
	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	orang	232	232	36.327.480.265	17.281.071.299	47,57	47,57
	1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	6	1	1.590.000	1.500.000	94,34	100,00
	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang dilaksanakan	Jenis	2	0	20.400.000	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stel	34	0	20.400.000	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-	OK	6	0	-	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		undangan							
	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang disediakan	Jenis	3	2	100.730.000	7.343.690	7,29	7,94
	1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	3	0	14.000.000	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	2	1	19.500.000	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OK	14	4	67.230.000	7.343.690	10,92	11,90
	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	Jenis	1	1	749.999.800	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	4	4	749.999.800	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Jenis	1	0	2.485.000	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	Paket/Surat	200	0	2.485.000	-	0,00	0,00
	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan BLUD yang disediakan	Jenis	1	1	120.226.167.000	49.886.974.146	41,49	42,21
	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah operasional pelayanan rumah sakit	Bulan	12	6	120.226.167.000	49.886.974.146	41,49	42,21
2	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	%	100	23,51	106.541.559.316	19.240.609.940	18,06	23,51
	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP yang disediakan	Jenis	5	4	105.491.559.316	19.240.609.940	18,24	23,74
	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan	Jumlah pembangunan RS beserta sarana dan	Unit	24	7	1.822.718.910	-	0,00	0,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prasarana Pendukungnya	prasarananya							
	1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah pengembangan RS	Unit	2	0	77.098.087.000	19.240.609.940	24,96	30,48
	1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas	Unit	14	8	2.041.578.000	-	0,00	0,00
	1.02.02.2.01.08 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jenis	12	7	3.404.017.406	-	0,00	45,49
	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alkes	Jenis	77	53	21.125.158.000	-	0,00	0,00
	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan	Jenis	1	1	1.000.000.000	-	0,00	0,00
	1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah perawatan dan pengobatan bagi pasien tidak mampu	OK	250	105	1.000.000.000	-	0,00	0,00
	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jenis	1	1	50.000.000	-	0,00	0,00
	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	1	50.000.000	-	0,00	0,00
3	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Kemitraan Pelayanan Kesehatan	%	100	31	9.095.820.005	2.842.656.867	31,25	31,25
	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jenis	1	0	9.014.700.005	2.828.196.867	31,37	31,37
	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah tenaga yang mengikuti penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan	OK	9	1	9.014.700.005	2.828.196.867	31,37	31,37

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jenis	3	3	81.120.000	14.460.000	17,83	17,87
	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Orang	92	92	81.120.000	14.460.000	17,83	17,87
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)	%	100	32,66		273.072.731.386	89.986.380.442	32,95	35,13

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, RSUD Sultan Imanudin telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 32,66%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terbagi dalam 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.225,060,448,393 ,00. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp.65,341,109,772,00 atau 29.03% serta realisasi fisik sebesar 45,58%. Adapun realisasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	5.843.900	-	0,00	53,33
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	-	-	0,00	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	973.850	-	0,00	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1		973.850	-	0,00	20,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1		973.850	-	0,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1		973.850	-	0,00	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	974.650	-	0,00	50,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	973.850	-	0,00	50,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	100	100	8.269.864.709	3.931.185.816	47,54	47,54
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	12	6	7.523.364.809	3.576.752.466	47,54	47,54
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1		742.816.000	354.433.350	47,71	47,71
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen/Laporan	1		3.358.900	-	0,00	0,00
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tanggapan pemeriksaan	laporan	1		-	-	0,00	0,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Dokumen/Laporan	2	1	325.000	-	0,00	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Dokumen	100	100	9.894.950	-	0,00	0,00
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen asuransi barang yang tersedia	Dokumen	1		9.894.950	-	0,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	100	25	16.500.000	-	0,00	100,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin Absensi yang diadakan	Unit	2	2	16.500.000	-	0,00	100,00
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Orang	7	0	-	-	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	100	50	412.373.383	188.560.328	45,73	92,77
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	101	101	7.277.050	7.277.050	100,00	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	3	3	137.243.447	136.641.868	99,56	99,56
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	5	0	22.574.376	-	0,00	0,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	6	5	51.288.510	44.641.410	87,04	87,04
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Orang/ kali	200	135	193.990.000	-	0,00	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jenis	100	100	75.383.319	36.008.346	47,77	100,00
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	33	33	75.383.319	36.008.346	47,77	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	100	55	777.443.560	301.554.805	38,79	42,55
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	251.843.560	97.806.545	38,84	50,45
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jenis	12	5	525.600.000	203.748.260	38,76	38,76
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	100	35	127.849.000	7.790.000	6,09	6,09
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	32	1	40.333.000	-	0,00	0,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	8	1	62.796.000	-	0,00	0,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	1	24.720.000	7.790.000	31,51	31,51
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	-	-	-	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	80,15	84,22	15.915.474.100	3.021.554.522	18,99	61,55
		Persentase penambahan kapasitas tampung air di embung dan bangunan penampung air lainnya	%	95,25	0				
		Persentase panjang kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	%	12,39	15,36				
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase utama dan sungai yang ditangani	%	12,65	12	4.734.142.100	770.225.200	16,27	68,10
		Presentase panjang kawasan erosi dan abrasi pantai yang ditangani	%	10	0				
		Volume kapasitas tampung embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	m3	5,6E+07	55.853.476				
6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang ditangani	embung	7	5	1.015.124.000	237.906.200	23,44	83,23
27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang direhab	m	3,848	6,557	1.280.186.100	247.699.000	19,35	62,30
37	Peningkatan Kanal Banjir	Panjang kanal banjir yang ditingkatkan	m	150	45	500.000.000	-	0,00	35,96
46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	m	2,546	0	1.938.832.000	284.620.000	14,68	72,31
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase daerah irigasi dan daerah irigasi rawa yang ditangani	m	84,62		11.181.332.000	2.251.329.322	20,13	58,77
4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	m	2.693,4 m	3,1	8.529.832.000	1.476.884.372	17,31	53,19
10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	m	10.495 m	2,048	1.540.000.000	487.791.950	31,67	70,16
21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dipelihara	m		25,104	300.000.000	-	0,00	84,62
23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang dipelihara	m	5.344,5 m	33,136	811.500.000	286.653.000	35,32	86,31

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak	%	100		4.973.014.000	1.237.832.585	24,89	55,76
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk terlayani air minum	Jiwa	227,048	245,108	4.973.014.000	1.237.832.585	24,89	55,76
		Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	KK	62,336	61,277				
3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang jaringan perpipaan SPAM yang dibangun diperkotaan	m	2 unit	2	4.773.014.000	1.185.541.355	24,84	54,07
4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang jaringan perpipaan SPAM yang dibangun diperdesaan	m	8 unit	2	200.000.000	52.291.230	26,15	96,20
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pelayanan pengolahan air limbah domestik	%	100	88,71	3.765.075.000	865.298.000	22,98	46,90
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga terlayani akses Layak air limbah domestik	KK	61,272	61,05	3.765.075.000	865.298.000	22,98	46,90
6	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Prasarana Air Limbah yang dibangun	Unit	472 unit	300	3.765.075.000	865.298.000	22,98	46,90
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)	%	84		7.683.340.000	710.450.150	9,25	13,01
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas Genangan yang Tertangani				7.683.340.000	710.450.150	9,25	13,01
12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang dibangun	m	4,07	130	7.183.340.000	708.701.700	9,87	13,89
14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang direhab	m	493	0	500.000.000	1.748.450	0,35	0,35
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Estetika Kawasan Publik Berstandar Internasional	%	48,75		20.722.428.254	308.097.151	1,49	17,44
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang pembangunan jalan lingkungan pemukiman dan Panjang peningkatan jalan lingkungan pemukiman				20.722.428.254	308.097.151	1,49	17,44
1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan pemukiman yang dibangun	Km	47 Km	0,723	19.857.428.254	308.097.151	1,55	14,89
2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan pemukiman yang dipelihara	Km	2,8 Km	0,707	865.000.000	-	0,00	75,85

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase estetika kawasan publik berstandar internasional	%	48,75	81,25	37.921.160.557	11.456.566.106	30,21	30,36
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah infrastruktur strategis yang dibangun	Unit	6	2	37.921.160.557	11.456.566.106	30,21	30,36
2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur strategis yang dibangun	Unit	6	2	37.921.160.557	11.456.566.106	30,21	30,36
5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan realisasi fisik kegiatan bidang Cipta Karya	Laporan	12	6	-	-	0,00	0,00
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase estetika kawasan publik berstandar internasional	%	48,75	0	332.400.000	13.500.000	4,06	23,74
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100	0	332.400.000	13.500.000	4,06	23,74
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun	Dok	2	0	332.400.000	13.500.000	4,06	23,74
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	43,3		117.048.470.719	42.065.778.939	35,94	54,50
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten kondisi baik	km	529492		117.048.470.719	42.065.778.939	35,94	54,50
		Rasio panjang jalan terbangun terhadap target rencana panjang jalan		0,88					
4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	panjang jalan kabupaten yang disurvei	km	2 dokumen	2	1.010.422.500	401.868.900	39,77	40,07
5	Pembangunan Jalan	panjang jalan kabupaten yang dibangun	km	5 km	38,93	2.290.544.358	143.003.550	6,24	21,62
8	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan kabupaten yang direkonstruksi	km	9,2 km	104	100.834.170.799	38.198.481.401	37,88	56,57
9	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan kabupaten yang direhab	km	22 ruas	141	4.448.073.108	209.784.730	4,72	40,24
12	Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan kabupaten yang dibangun	unit	15 unit	58	7.865.259.954	3.093.984.358	39,34	51,41
18	Rehabilitasi Jembatan	jumlah jembatan kabupaten yang direhab	unit	19 unit	86	600.000.000	18.656.000	3,11	3,20

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kab/kota pada SIPJAKI	%	90	42,86	578.249.042	189.145.246	32,71	51,65
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	%	100	42,86	163.527.108	62.066.528	37,95	51,54
4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi keterampilan konstruksi	orang	150 orang	75	147.581.775	48.308.688	32,73	46,30
7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek PJTBU	lembaga	30 orang	30	15.945.333	13.757.840	86,28	100,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	%	100		380.248.494	92.605.278	24,35	47,31
1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan terkait kelembagaan jasa konstruksi	Orang	70 orang		380.248.494	92.605.278	24,35	47,31
		Jumlah laporan informasi jasa konstruksi	Lap	1					
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi	%	100		34.473.440	34.473.440	100,00	100,00
2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah penyelenggara konstruksi yang mengikuti bimtek/sosialisasi peraturan jasa konstruksi	Orang	40 orang	40 orang	34.473.440	34.473.440	100,00	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW kabupaten	%	94		5.067.492.200	631.475.300	12,46	53,97
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi penyelenggaraan penataan ruang	%	85,92	94,84	4.873.900.400	562.466.300	11,54	54,27
3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Pendukung Penetapan Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	7	7	4.873.900.400	562.466.300	11,54	54,27
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi penyelenggaraan penataan ruang	%			101.124.000	41.174.400	40,72	49,05
2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen Informasi Penataan Ruang	Laporan	1		101.124.000	41.174.400	40,72	49,05
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi penyelenggaraan penataan ruang	%			92.467.800	27.834.600	30,10	43,76
4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan koordinasi penataan ruang	Laporan	1 laporan		92.467.800	27.834.600	30,10	43,76
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pencapaian retribusi kekayaan daerah	%	100		426.908.500	115.116.428	26,97	32,78

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	100		330.033.500	96.006.428	29,09	36,61
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang diadakan	Jenis	6 Jenis		330.033.500	96.006.428	29,09	36,61
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	100		96.875.000	19.110.000	19,73	19,73
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat-alat ukur laboratorium	Jenis	24 jenis		96.875.000	19.110.000	19,73	19,73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pencapaian retribusi kekayaan daerah	%	100		931.283.200	261.196.050	28,05	36,06
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	100		931.283.200	261.196.050	28,05	36,06
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat berat	unit	14 Unit		931.283.200	261.196.050	28,05	36,06
	TOTAL					225.060.448.393	65.341.109.772	29,03	45,58

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 45,58%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9,259,990,900,00 dan realisasi pada akhir Triwulan II sebesar Rp.3,579,739,678,00 atau 38,66%. Adapun realisasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Akhir Triwulan II 2021)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	55	3,631,226,488	1,848,880,303	50.92	55.29
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	21	11	17,885,500	9,417,750	52.66	52.70

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	1	10,039,500	6,706,000	66.80	66.87
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	0	1,787,500	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	0	1,787,500	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1,218,750	1,218,750	100	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	0	1,218,750	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	12	6	838,500	498,000	59.39	59.55
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	3	3	995,000	995,000	100	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	31	14	3,229,246,035	1,619,821,572	50.16	54.29
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	14	5	3,081,768,535	1,553,097,622	50.40	54.34
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	6	143,773,250	64,582,200	44.92	53.10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen/Laporan	1	1	1,520,850	1,520,850	100	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disusun	Dokumen/Laporan	4	2	2,183,400	620,900	28.44	41.67
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah	Dokumen	0	0	-	-	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen asuransi barang yang tersedia	Dokumen	0	0	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2	19,440,157	19,109,200	98.30	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	1	1	600,000	600,000	100	100.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Orang	2	2	18,840,157	18,509,200	98.24	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	5	1	110,251,034	81,219,738	73.67	73.79
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Jenis	10	10	7,637,718	7,632,400	99.93	100.00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bangunan kantor yang disediakan							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	41	33	35,419,549	28,037,065	79.16	79.29
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	23	17	8,728,588	7,991,413	91.55	91.61
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	8	7	13,255,179	12,647,202	95.41	95.52
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Orang/kali	10	6	45,210,000	24,911,658	55.10	55.25
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jenis	4	2	34,310,210	34,035,230	99.20	100.00
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	Buah	2	2	1,430,000	1,300,000	90.91	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	4	24	30,570,210	30,425,230	99.53	100.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Buah	15	15	2,310,000	2,310,000	100	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	3	0	205,034,352	78,181,013	38.13	50.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	kg.paket/surat	8	0	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	61,675,152	21,447,620	34.78	50.01
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	6	143,359,200	56,733,393	39.57	50.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	2	0	15,059,200	7,095,800	47.12	49.62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	4	2	2,799,200	675,800	24.14	24.24
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	28	10	12,260,000	6,420,000	52.37	55.41
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase ketersediaan rumah layak huni	%	97	96.66	5,470,000	2,148,000	39.27	45.65

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	1	1	5,470,000	2,148,000	39.27	45.65
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	Kegiatan	3	3	5,470,000	2,148,000	39.27	45.65
3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penataan kawasan kumuh	%	1.158	0	22,975,000	4,462,000	19.42	23.47
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen database Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang tersusun	Dokumen	0	0	7,035,000	1,392,000	19.79	29.71
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang tersusun	Dokumen	0	0	7,035,000	1,392,000	19.79	29.71
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis	1	1	15,940,000	3,070,000	19.26	20.72
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh yang dilaksanakan	Kegiatan	3	1	15,940,000	3,070,000	19.26	20.72
4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase ketersediaan rumah layak huni	%	97	96.66	1,355,806,300	1,261,968,000	93.08	93.96
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Unit	69	116	1,355,806,300	1,261,968,000	93.08	93.96
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah peningkatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni	Unit	69	116	1,355,806,300	1,261,968,000	93.08	93.96
5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penataan kawasan kumuh	%	1.158	0	4,244,513,112	462,281,375	10.89	54.25
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU perumahan untuk menunjang fungsi hunian yang terbangun	Unit	8	2	4,244,513,112	462,281,375	10.89	54.25

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	jumlah dokumen database penyediaan PSU perumahan	Dokumen	1	1	37,213,000	15,571,000	41.84	49.15
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU yang terbangun pada lingkungan perumahan	Unit	8	2	4,176,300,112	435,763,375	10.43	54.35
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terlaksana	Kegiatan	4	3	31,000,000	10,947,000	35.31	47.14
TOTAL						9,312,455,900	3,587,318,678	38.52	60.15
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)			%		50				

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 50%, atau masuk kategori **rendah**.

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	%	80	0	20,110,000	2,196,000	10.92	11.28
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Lokasi	2	2	20,110,000	2,196,000	10.92	11.28
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdata/terinventarisasi	Lokasi	2	2	20,110,000	2,196,000	10.92	11.28
		Jumlah penyuluhan/pencegahan/mediasi/fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman	Kegiatan	0	0				
2.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase aset daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	%	100	0	15,300,000	3,310,000	21.63	29.93
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Kegiatan	3	1	15,300,000	3,310,000	21.63	29.93

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	1	15,300,000	3,310,000	21.63	29.93
3.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	18.68	40.38	17,055,000	2,073,000	12.15	12.98
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen database penggunaan tanah yang tersusun	Dokumen	1	1	17,055,000	2,073,000	12.15	12.98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	6,815,000	975,000	14.31	16.11
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	10,240,000	1,098,000	10.72	10.89
		Jumlah luas lahan permukiman yang terdata	Ha	0	0				
TOTAL						9,312,455,900	3,587,318,678	38.52	60.15
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)			%		31.59				

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada **Urusan Pertanahan** adalah sebesar 36.12%, atau masuk kategori **sangat rendah**.

Dari rata-rata capaian kinerja pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan, maka rata-rata capaian kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 43.06%, atau masuk kategori **sangat rendah**.

2.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran alokasi anggaran sebesar Rp.12,124,268,602.00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5,835,064,304.00 atau 48,13%, dan realisasi fisik sebesar 27,92%. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah alokasi anggaran sebesar Rp.9,121,327,349 dengan realisasi keuangan pada akhir Triwulan II sebesar Rp.1,475,325,709.00 atau 16,17% dengan realisasi fisik sebesar 38,72 %. Adapun realisasi anggaran urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	45	9,474,707,246	4,781,615,080	50.47	23.05
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	15	9	1,580,095	449,900	28.47	6.12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	2	1,201,885	200,000	16.64	16.64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	12	7	128,310	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	3	2	249,900	249,900	100.00	50.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	131	25	8,209,421,931	4,466,476,045	54.41	54.41
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	13	7	8,197,328,000	4,465,377,045	54.47	54.47
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	100	0	11,054,000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen/Laporan	1	1	689,931	749,000	108.56	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disusun	Dokumen/Laporan	17	17	350,000	350,000	100.00	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2	286,593,573	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stel	138	138	282,613,573	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Orang	6	0	3,980,000	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	5	4	202,558,737	108,633,520	53.63	27.27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	4	3	4,137,485	1,000,000	24.17	17.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	33	25	133,711,424	93,839,470	70.18	58.89
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	1	0	2,250,000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	4	4	36,449,828	13,794,050	37.84	33.22
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Orang/kali	6	0	26,010,000	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	1	1	4,999,995	4,980,000	99.60	100.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Buah	1	1	4,999,995	4,980,000	99.60	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	3	2	257,858,316	124,096,615	48.13	27.82
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	kg.paket/surat	5	0	175,000	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	8	46,350,001	27,074,298	58.41	22.67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bulan	12	8	211,333,315	97,022,317	45.91	30.81
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jenis	3	2	511,694,599	122,780,000	23.99	26.71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	1	0	25,432,787	4,800,000	18.87	12.31
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	26	10	460,951,812	110,185,000	23.90	23.49
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	66	57	25,310,000	7,795,000	30.80	14.35
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%	50	102.14	1,831,871,600	755,602,115	41.25	22.14
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban	kasus	100	0	1,809,745,000	755,602,115	41.75	23.22
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	kegiatan	67	0	73,425,000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan								
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kordinasi penyelenggaraan trantibum	kegiatan	14	0	14,840,000	-	-	-
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	tersedianya jumlah petugas/anggota keamanan dan kenyamanan lingkungan	orang	38	0	1,678,080,000	755,602,115	45.03	28.45
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah SDM satpol yang dilatih	orang	51	0	35,100,000	-	-	-
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi/sinegritas dengan POLRI, TNI, Kejaksaan, PPNS dan aparaturnya dalam proses penindakan	kali	12	0	3,300,000	-	-	-
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	jumlah layanan yang disediakan	kali	2	0	5,000,000	-	-	-
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus pelanggaran perda	kasus	50	204.28	22,126,600	-	-	-
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi penegakan perda	orang	0	0	-	-	-	-
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pengawasan penegakan perda dan perkada	Laporan	12	3	5,880,000	-	-	-
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus pelanggaran perda yang ditangani	kasus	90	405.56	16,246,600	-	-	-
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) sesuai standar	%	75	42.67	1,069,735,865	252,046,109	23.56	8.57
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	kegiatan	80	32	817,689,756	252,046,109	30.82	9.75
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dibayarkan untuk pemadaman dan penyelamatan	orang	17	0	760,320,000	252,046,109	33.15	10.51
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	aduan	35	0	57,369,756	-	-	-
		Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pencegahan	orang						

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kebakaran							
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi	orang			-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan edukasi	orang			-	-	-	-
TOTAL						12,124,268,602	5,835,064,304	48.13	27.92
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)			%	75.00	63.27				

Rata-rata capaian kinerja pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mencapai 63,27 %, atau masuk kategori **rendah**.

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase penanganan bencana yang responsif	%	85	100	4,735,393,682	653,195,770	-	19.83
1	Kegiatan Pelayanan Informasi rawan Bencana	Persentase pemenuhan layanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	%	100	0	106,765,580	-	-	-
1.1	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100	0	106,765,580	-	-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	33.3	532,097,912	10,364,000	-	17.82
2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan warga yang ikut pelatihan	%	50	0		-	-	-
2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops Penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	205,210,000	-	-	22.32
2.3	Pengelolaan Risiko Bencana	Persentase kawasan rawan bencana yang terpantau	%	100	100	39,624,000	-	-	56.19
2.4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan darurat fasilitas publik terdampak bencana	%	100	0	166,547,712	-	-	1.40
2.5	Pengembangan Kapasitas TRC Bencana Kabupaten/Kota	Persentase (%) jumlah TRC yang telah mengikuti pelatihan	%	100	0	5,500,000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TRC							
2.6	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase (%) penyelesaian penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal.	%	100	0	115,216,200	10,364,000	-	27.00
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	4,068,210,190	642,831,770	-	61.51
3.1	Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana	%	100	100	511,104,000	214,902,400	-	35.69
3.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian	%	100	100	50,000,000	-	-	69.59
3.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban	%	100	100	212,915,000	17,309,370	-	57.25
3.4	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	3,294,191,190			
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah regulasi penanganan bencana terpadu yang tersusun	dokumen	6	0	28,320,000	-	-	-
4.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penilaian Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	keg	1	0		-	-	-
4.2	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama (MoU) dengan instansi lintas sektor yang telah disepakati dan masih berlaku	dokumen	6	0	28,320,000	-	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	23	4,385,933,667	822,129,939	-	49.51
5	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penmganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	dokumen	9	5	5,236,100	-	-	66.67
5.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	2	925,000	-	-	100.00
5.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	dokumen	1		1,100,000	-	-	100.00
5.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	dokumen	1		1,590,000	-	-	-
5.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	dokumen	1		572,000	-	-	100.00
5.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	dokumen	1		572,000	-	-	-
5.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan kinerja yang disusun	dokumen	3	3	477,100	-	-	100

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	75	3,596,205,475	683,829,688	-	48.47
6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	prosentase jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	%	100	100	3,500,636,975	656,151,788	-	19.23
6.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanagan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan yang disediakan	ob	36	18	94,176,000	26,927,900	-	24.64
6.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah aparatur yang mengikuti konsinyering penyusunan laporan	orang	3	3	750,000	750,000	-	100
6.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	laporan	2	1	642,500	-	-	50
7	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	1	12,470,000	-	-	100
7.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	oh	79	1	12,470,000	-	-	100
8	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	14	116,718,360	55,393,584	-	83.13
8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	5	0	9,034,080	-	-	100
8.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	28	0	22,337,250	-	-	100
8.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	4	0	-	-	-	-
8.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	jenis	5	0	22,727,030	-	-	50
8.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang difasilitasi kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	ok	22	22	62,620,000	55,393,584	-	82.5
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang diadakan	jenis	5	0	73,825,185	-	-	-
9.1	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	jenis	2	0	32,549,910	-	-	-
9.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	jenis	2	0	40,734,980	-	-	-
9.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan gedung lainnya yang diadakan	unit	1	0	540,295	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	50	382,575,546	82,906,667	-	28.70
10.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	bulan	12	6	155,759,756	22,056,010	-	25.00
10.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	ob	60	30	226,815,790	60,850,657	-	32.40
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah yang dipelihara	jenis	9	0	198,903,001	-	-	19.60
11.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan	unit	7	0	27,824,651	-	-	30.50
11.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan	unit	44	0	153,301,200	-	-	17.71
11.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	jenis	7	0	17,777,150	-	-	10.60
TOTAL						9,121,327,349	1,475,325,709	-	38.72
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)			%	92.5	61.31				

Rata-rata capaian kinerja pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai 61,31 %, atau masuk kategori **rendah**.

Dari rata-rata capaian kinerja kedua perangkat daerah di atas, maka rata-rata capaian kinerja pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 62,29%, yakni masuk kategori **rendah**.

2.7. Urusan Sosial

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.6,545,867,080,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,659,252,067,00 atau 40.62%, sedangkan realisasi fisik sebesar 44.24%. Adapun realisasi program urusan Sosial selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
	01.00 Dinas Sosial					6,545,867,080	2,661,352,067	40.66	44.24
I	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	%	100	33	4,744,495,450	2,287,698,735	48.22	50.45
	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah cakupan penyediaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja	Dokumen	6	2	148,642,400	61,163,365	41.15	41.15
	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	Dokumen	6	2	43,397,600	19,181,118	44.20	44.20
	1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	-	105,244,800	41,982,247	39.89	39.89
	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	8	4,121,522,042	2,024,709,539	49.13	49.13
	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji pegawai ASN yang di sediakan	Bulan	12	8	4,113,802,042	2,016,989,539	49.03	49.03
	1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	Dokumen	2	2	7,720,000	7,720,000	100.00	100.00
	1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangny	%	100	100	14,300,000	5,000,000	34.97	100.00
	1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	2	2	14,300,000	5,000,000		100.00
	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan administrasi perkantoran	%	100		164,166,420	67,946,460	41.39	84.44
	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	13	2	13,242,400	-	0.00	60.41
	1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	36	20	44,737,000	29,999,460	67.06	100.00
	1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	3	-	784,080	-	0.00	0.00
	1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jenis	10	5	25,887,100	25,887,100	100.00	100.00
	1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jenis	7	6	38,435,840	-	0.00	52.03
	1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kali	41	-	41,080,000	12,059,900	29.36	97.37

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
	1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100		35,678,400	26,600,000	74.55	21.30
	1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis mebeleur yang diadakan	Jenis	2	2	19,000,000	19,000,000	100.00	0.00
	1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan mesin yang dipelihara dan disediakan	Jenis	5	3	16,678,400	7,600,000	45.57	45.57
	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	%	100		204,402,168	98,699,891	48.29	51.56
	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	Lembar	75	-	962,100	-	0.00	0.00
	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	Bulan	12	6	111,587,008	48,310,960	43.29	49.29
	1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	6	91,853,060	50,388,931	54.86	54.86
	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara	%	100		55,784,020	3,579,480	6.42	26.89
	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	8	2	5,912,260	-	0.00	0.00
	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas lapangan yang di pelihara	Unit	3	1	49,871,760	3,579,480	7.18	30.08
II	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS perorangan dan kelembagaan yang aktif	%	100	28	123,720,580	37,970,750	30.69	0.00
	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberikan Peningkatan Potensi dan Sumber Daya Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Orang	25	25	123,720,580	37,970,750	30.69	46.88
	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	Orang	25	25	79,700,750	35,720,750	44.82	56.46
	1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) bagi Keluarga yang memiliki masalah Psikososial	Orang	40	9	27,699,830	2,250,000	8.12	28.88
	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring/Kelompok Sosial yang dibina	Kelompok	6	-	16,320,000			
		Meningkatnya Partisipasi PSKS dalam mengikuti kegiatan	Orang	80	-			0.00	30.64

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
III	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	39	74,606,850	16,824,000	22.55	
	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dipulangkan	Orang	130	51	74,606,850	16,824,000	22.55	33.51
	1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dipulangkan	Orang	130	51	74,606,850	16,824,000	22.55	33.51
IV	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	100	15	392,264,650	82,662,000	21.07	26.15
	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Orang	100	10	154,305,350	15,265,000	9.89	20.80
	1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial keluarga bagi penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang dilayani	Orang	100	10	119,305,350	15,265,000	12.79	25.15
	1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pelayanan penanganan Rehabilitasi Sosial	Orang	100	20	35,000,000		0.00	6.00
	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	10	1	237,959,300	67,397,000	28.32	29.61
	1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah stakeholder yang mendapatkan sosialisasi SLRT "NURANI"	Orang	2	-	223,649,500	60,460,000	27.03	27.03
		Jumlah petugas SLRT dan puskesmas yang terampil	Orang	4	-				
	1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	10	1	14,309,800	6,937,000	48.48	69.88
V	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	-	408,800,350	63,799,482	15.61	19.57
	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang yang	Orang	100	-	31,539,850	3,500,000	11.10	15.85

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
		terlayani							
	1.06.05.2.01.03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Orang	100	-	31,539,850	3,500,000	11.10	15.85
	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan	KK	10,880	10,499	377,260,500	60,299,482	15.98	19.88
	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data keluarga miskin yang di verifikasi dan validasi	RUTA	10,820	3,274	190,189,650	11,303,939	5.94	10.52
	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan pelaksanaan kegiatan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Dokumen	12	6	187,070,850	48,995,543		29.40
VI	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PMKS yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	-	423,994,200	22,994,100	0.00	0.00
	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Orang	350	-	343,856,000	-	0.00	5.82
	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan makanan	Orang	350	-	288,750,000	-	0.00	0.00
	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar	Orang	350	-	55,106,000	-	0.00	36.29
	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana	Kecamatan	6	-	80,138,200	22,994,100	28.69	56.15
	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang terlayani	Kecamatan	6	-	80,138,200	22,994,100		56.15
VII	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	50	377,985,000	147,303,000	38.97	42.67
	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Makam	1	1	377,985,000	147,303,000	38.97	42.67
	1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yg direhab	Makam	1	-	10,400,000	-	0.00	0.00
	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yg dalam pemeliharaan	Makam	1	1	367,585,000	147,303,000	40.07	43.88
		Rata-Rata Capaian Kinerja (Program)	%	100	23.57				

Dari table di atas rata-rata capaian kinerja capaian kinerja pada Urusan Sosial mencapai 23,57%, yakni masuk kategori **sangat rendah**.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.8. Urusan Tenaga Kerja

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan total alokasi anggaran belanja sebesar Rp.6,710,480,947,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,615,953,166,00 atau 38,98%, dan realisasi fisik sebesar 42%. Adapun realisasi anggaran urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.710.480.947	2.626.828.166	39,15	42,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100	100	5.400.792.043	2.421.840.194	44,84	43,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	34.947.600	13.845.291	39,62	44,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	1	1	34.947.600	13.845.291	39,62	44,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	29	9	4.199.735.106	2.251.069.008	53,60	42,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	14	4	4.122.379.906	2.220.126.701	53,86	49,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Laporan	12	4	75.155.200	29.117.307	38,74	43,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	1.450.000	1.450.000	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan/triwulan /semesteran yang disusun	Laporan	2	1	750.000	375.000	50,00	50,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	1	14.565.000	5.660.369	38,86	42,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stell	3	0	1.800.000	0	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	4	2	12.765.000	5.660.369	44,34	85,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	5	2	126.014.040	28.722.500	22,79	18,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan	Jenis	7	0	4.024.790	0	0,00	0,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bangunan kantor							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	41	25	36.234.979	0	0,00	0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	14	0	1.651.571	0	0,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Buku	30	0	19.062.700	9.800.000	51,41	51,41
		Jumlah penggandaan	Lembar	57.000	28.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Ok	26	28	65.040.000	18.922.500	29,09	68,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	Jenis	2	0	16.813.731	4.999.995	29,74	33,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jenis	2	0	0	0	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	4	1	16.813.731	4.999.995	29,74	33,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	4	4	262.223.066	103.043.031	39,30	35,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket / surat yang terkirim	Lembar	335	2	2.997.500	0	0,00	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	89.999.166	33.914.124	37,68	42,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	6	169.226.400	69.128.907	40,85	42,00
		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	6				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	3	2	746.493.500	14.500.000	1,94	38,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	9	1	30.793.500	9.550.000	31,01	45,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	29	7	16.100.000	4.950.000	30,75	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	0	699.600.000	0	0,00	0,00
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE JUMLAH PESERTA PELATIHAN YANG TERSERAP DI PASAR KERJA	Orang	87	0	591.710.040	14.162.939	2,39	9,00
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Orang	64	0	591.710.040	14.162.939	2,39	9,00
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Orang	64	0	493.862.540	14.162.939	2,87	22,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Ok	10	0	14.000.000	0	0,00	5,00
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana dan prasarana peralatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jenis	10	0	83.847.500	0	0,00	0,00
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TINGKAT PENEMPATAN TENAGA KERJA	%	7,50	4,48	391.021.260,00	48.478.628	12,40	23,00
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan informasi bursa kerja	Laporan	12	6	314.196.600	13.487.939	4,29	5,00
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pelatihan tenaga kerja siap pakai / padat karya	Laporan	12	0	314.196.600	13.487.939	4,29	5,00
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan informasi bursa kerja	Laporan	12	6	63.249.610	33.518.689	52,99	53,00
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah laporan informasi bursa kerja	Laporan	12	6	63.249.610	33.518.689	52,99	53,00
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan informasi bursa kerja	Laporan	12	6	13.575.050	1.472.000	10,84	15,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penempatan tenaga kerja asing (TKA) berdasarkan laporan perusahaan	Orang	59	10	13.575.050	1.472.000	10,84	15,00
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PENURUNAN PENGADUAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA	%	95	0	126.808.500	38.409.466	30,29	35,00
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten	Dokumen	2	0	66.959.100	16.632.527	24,84	25,00
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Dokumen	2	0	66.959.100	16.632.527	24,84	25,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan perselisihan hubungan industrial dan pengaduan yang tertangani	%	95	0	59.849.400	21.776.939	36,39	40,00
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelesaian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja	Laporan	1	0	10.976.100	2.396.000	21,83	30,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan perselisihan HI	Kasus	15	0	11.968.450	5.218.000	43,60	50,00
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Orang	45	0	36.904.850	14.162.939	38,38	37,00
	BALAI LATIHAN KERJA								
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100	25	200.149.104	63.270.613	31,61	42,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	2	200.149.104	63.270.613	31,61	42,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	27.817.104	9.281.516	33,37	42,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	6	172.332.000	53.989.097	31,33	42,00
		Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	6				

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada Tenaga Kerja adalah sebesar 40%, atau masuk kategori **Sangat Rendah**.

2.9. Urusan Transmigrasi

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan transmigrasi diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi alokasi anggaran belanja sebesar Rp.352,617,600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 103,936,939.00 atau 29,48%, dan realisasi fisik sebesar 32 %. Adapun realisasi anggaran urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					352.617.600	103.936.939	29,48	32,00
6	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PENINGKATAN STATUS DOKUMEN RENCANA SATUAN PEMUKIMAN	Dokum en	1	0	9.210.000	0	0,00	0,00
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan rekomendasinya	Dokum en	30	0	9.210.000	0	0,00	0,00
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan rekomendasinya	Dokum en	30	0	9.210.000	0	0,00	0,00
7	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PENINGKATAN STATUS DOKUMEN RENCANA SATUAN PEMUKIMAN	Dokum en	1	0	334.197.600	103.562.939	30,99	33,00
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian rencana pembangunan permukiman transmigrasi	Dokum en	1	0	334.197.600	103.562.939	30,99	33,00
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah kajian pembangunan permukiman	Dokum en	1	0	334.197.600	103.562.939	30,99	33,00
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE PENINGKATAN STATUS DOKUMEN RENCANA SATUAN PEMUKIMAN	Dokum en	1	0	9.210.000	374.000	4,06	10,00
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah kelompok usaha, sosial budaya dan peningkatan kapasitas SDM Transmigrasi (Pembinaan Eks. Trans dan Trans Baru)	Kelomp ok	30	0	9.210.000	374.000	4,06	10,00
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah kelompok usaha, sosial budaya dan peningkatan kapasitas SDM Transmigrasi (Pembinaan Eks. Trans dan Trans Baru)	Kelomp ok	30	0	9.210.000	374.000	4,06	10,00

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian kinerja pada Urusan Transmigrasi adalah sebesar 30%, atau masuk kategori **Sangat Rendah**.

2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.5,067,892,740,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2,525,154,921,00 atau 49,83%. Adapun realisasi anggaran urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	02.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	45	4.728.115.554	-	-	0
	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	Dokumen	3	3	41.045.100			
	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	3	898.500	898.500	100	
	2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	3	-	998.250	-	-	
	2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	998.250	-	-	
	2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	998.250	-	-	
	2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	998.250	-	-	
	2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	2	1	35.505.600	11.789.432	33,20	
	2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	3	1	648.000	-	-	
	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	45		4.118.079.300	-	-	
	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	14	9	4.113.373.000	1.686.928.424	41,01	
	2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi keuangan yang dilaksanakan	Bulan	12	6	1.000.000	-	-	
	2.08.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi	Dokumen	1	-	322.950	-	-	
	2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	1	-	1.883.700	1.133.700	60,18	
	2.08.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Laporan	1	1	499.750	-	-	
	2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan Bulanan/Triwulan/Seme	Dokumen	2	1	999.900	-	-	

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	steran yang disusun	en						
	2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	45	2	59.176.000	-	-	
	2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	Stell	36	-	3.000.000	-	-	
	2.08.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	5	2	56.176.000	-	-	
	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	4	4	125.504.889	-	-	
	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	5	5	996.435	996.435	100	
	2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	60	30	31.659.199	7.931.740	25,05	
	2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	17	10	6.519.350	3.425.589	52,54	
	2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0	-	-	
	2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	Jenis	5	3	15.470.305	-	-	
	2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah orang yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang disediakan	Orang	9	5	70.859.600	17.834.615	25,17	
	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	5	-	32.238.987	-	-	
	2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jenis mebel yang disediakan	Jenis	3	-	17.864.000	-	-	
	2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	3	-	14.374.987	-	-	
	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	5	2	224.526.440	-	-	
	2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	Paket	7	3	245.000	-	-	
	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	59.257.440	16.972.690		2
	2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	6	165.024.000	53.964.660	32,70	
	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Gedung	1		127.544.838	-	-	
	2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	34	5	23.951.400	2.335.900	9,75	

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Unit	2	1	1.380.000	-	-	
	2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhabilitasi	Unit	1	-	99.773.438	-	-	
	2.08.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi penyuluh KKBPK dalam memberikan penyuluhan	Unit	4	2	2.440.000	1.500.000	61,48	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Jumlah SKPD yang Menerapkan ARG	%	55,55	55,55	150.705.336	-	-	0
	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang melaksanakan PUG termasuk PPRG	SKPD	36	-	52.753.830	-	-	
	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang Melaksanakan PUG termasuk PPRG	SKPD	36	-	52.753.830	-	-	
	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif	%	13,40	13,33	97.951.506	-	-	
	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang berpartisipasi pada organisasi Perempuan	Orang	427	-	97.951.506	26.391.062	26,94	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	%	0,0025		19.637.350	-	-	0
	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pihak terkait yang melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap perempuan	Instansi	35	35	19.637.350	-	-	
	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Korban Kekerasan terhadap perempuan	%	100		19.637.350	-	-	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase partisipasi Anak dalam peningkatan tumbuh kembang anak	%	1,45	0,60	73.124.260	-	-	0
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang terlibat dalam Forum anak	Orang	320		73.124.260	-	-	
	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang terlibat dalam Forum anak	Anak	70	-	22.247.110	-	-	

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan pelatihan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak	Anak	70	-	22.000.470	-	-	
	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader PATBM yang mendapatkan Pelatihan	Orang	60	-	28.876.680	-	-	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Lembaga PATBM Desa/Kelurahan	%	13,82	10,71	96.310.240	-	-	0
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kader PATBM yang mendapatkan Pelatihan	Orang	20	-	96.310.240	-	-	
	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kawasan Ramah Anak yang mendapatkan Alat Permainan Edukatif	Unit	5	5	23.375.000	-	-	
	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan/wilayah dan fasilitas publik yang ramah anak	Desa	2	-	72.935.240	38.999.072	53,47	

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar 65%, atau masuk kategori **Rendah**.

2.11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.3,088,384,638,00 dan terealisasi sebesar Rp184,759,959,00 atau 5,98%. Adapun realisasi anggaran urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						-	-	
	02.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						-	-	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase Kampung KB yang terbina	%	78	68	123.183.648	-	-	0
	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah peserta yang mendapat advokasi penggerakan dan penyuluhan KB	Orang	70	-	5.456.000	-	-	
	2.14.02.2.01.12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta yang mendapat advokasi penggerakan dan penyuluhan KB Jumlah rumah dataku di kampung KB yang dibentuk	Orang	210	-	5.456.000	-	-	
	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pendataan yang dilatih	Orang	76	76	117.727.648	-	-	
	2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Petugas Pendataan yang dilatih	Orang	131	131	117.727.648	26.785.853	22,75	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Peserta KB Baru	%	12,50	-	2.869.500.990	-	-	0
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan pengetahuan PHRI	Orang	155	-	580.475.510	-	-	
	2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan pengetahuan PHRI Jumlah pengurus koalisi kependudukan yang mengikuti pertemuan dan munas program KKBPK Tersedianya data Pelkon dan Dallap oleh Kader/PKB	Orang	50	-	27.007.584	15.437.419	57,16	
	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Orang	58	-	131.155.346	18.084.000	13,79	
	2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penulhan KKBPK		Orang	396	-	422.312.580	1.590.500	0,38	
	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Frekuensi penyuluh KKBPK dalam memberikan penyuluhan	Kegiatan	4	-	450.000.000	-	-	
	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	Jumlah kegiatan pelayanan KB	Orang	400	-	154.493.344	25.945.464	16,79	

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
	2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah kelompok PIK yang terbentuk	Kelompok	5	-	13.730.526	-	-	
	2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Aseptor MKJP	Orang	347	338	165.379.010	-		
	2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Alat Kesehatan jumlah sarana penunjang pelayanan KB Jumlah sarana prasarana	Unit	7		1.261.717.000	-	-	
	2.14.03.2.03.07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah kegiatan pelayanan KB	Kegiatan	20	-	0	-	-	
	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Frekuensi penyuluh KKBPK dalam memberikan penyuluhan	Kali	267	-	243.705.600	-	-	
	2.14.03.2.04.01 Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan penyuluhan	PUS	556	-	35.505.600	11.789.432	33,20	
	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dikelola		19	9	208.200.000	-		
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase Lembaga Posyandu Aktif	%	16	-	95.700.000	-	-	0
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase peserta KB baru	%	12,50	-	95.700.000	-	-	
	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok PIK yang terbentuk	Kelompok	20	-	0	-	-	
	2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kegiatan Poktan	Kegiatan	12		95.700.000	-		
	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta						-	-	

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	2.14.04.2.02.01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						-	-	

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebesar 50%, atau masuk kategori **rendah**.

2.12. Urusan Pangan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.4,659,117,122,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,211,099,278 ,00 atau 47,46 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 51,43% Adapun realisasi anggaran urusan Pangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pangan Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90	50	3.910.430.883	1.998.515.278	51,11	55
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	2	1	18.004.435	-	-	2,41
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Lap	1	1	434.435	-	-	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Laporan MONEV Ketahanan Pangan	Dok	1	1	17.570.000	-	-	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	4	4	3.518.046.406	1.909.761.065	54,28	54
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam	Dok	14	7	3.510.887.221	1.909.761.065	54,40	54

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		setahun							
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dok	200	50	5.065.000	-	-	4,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Lap	1	1	1.749.285	-	-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran yang disusun	Lap	1	1	344.900	-	-	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2	21.840.000	3.000.000	13,74	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stell	5	5	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	orang/kali	5	2	18.840.000	-	-	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	5	4	132.210.521	4.094.800	3,10	34
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	4	4	1.927.772	-	-	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	37	37	28.719.757	-	-	68
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Jenis	18	18	4.096.730	4.094.800	99,95	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis <u>penggandaan yang disediakan</u>	Jenis	5	5	42.071.262	-	-	36
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OK yang mengikuti aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Ok	37	20	55.395.000	-	-	7,22
	Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	Jenis	1	0	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jenis	1	0	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	3	2	183.847.999	73.659.413	40,07	79
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/paket yang terkirim	Surat/paket	16	0	499.999	-	-	30,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	7	45.213.600	17.146.651	37,92	70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	7	138.134.400	56.512.762	40,91	82
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	2	2	36.481.522	8.000.000	21,93	25

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	22	7	18.781.522	-	-	5,32
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	35	14	17.700.000	8.000.000	45,20	45
									-
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	%	60	60	19.855.000	-	-	26,44
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemantauan serta Analisis Pangan masyarakat Kab.KTW.Barat	dok	1	0	19.855.000	-	-	#DIV/0!
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang dibina untuk pengembangan Lumbung Pangan	desa	2	0	3.840.000	-	-	32,55
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat KOBAR	dok	1	0	16.015.000	-	-	25
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	AKE (Angka Kecukupan Energi)	KKAL/ KAP/H ari	2158	0	689.401.652	211.209.000	30,64	36
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen hasil kegiatan penyediaan informasi harga,pasokan dan akses pangan daerah masyarakat KOBAR	dok	1	0	45.235.850	5.500.000	12,16	48
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan penyediaan informasi harga,pasokan dan akses pangan daerah	dok	12	7	10.255.850	-	-	48,75
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan pasar pangan murah yang dilaksanakan	kali	2	2	34.980.000	5.500.000	15,72	47,74
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pengelolaan cadangan pangan kabupaten KTW.Barat	dok	1	0	3.142.500	-	-	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah	lap	1	0	3.142.500	-	-	#DIV/0!
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Laporan SKOR PPH	dok	1	0	641.023.302	205.709.000	32,09	35,67
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan masyarakat KOBAR	lap	1	0	5.530.000	-	-	12,66
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi pengembangan pemanfaatan pangan pokok lokal	orang	40	0	620.988.802	205.709.000	33,13	36,71

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah kelompok Wanita Tani yang dibina/didampingi melaksanakan P2L	Kwt	8	0		-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen pemantauan ketersediaan dan Analisis Neraca Bahan Makanan	dok	1	0	14.504.500	-	-	34,47
									-
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Kerawanan Pangan	%	1	0	10.716.650	-	-	19
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase jumlah kelompok Afinitas DEMAPAN dan REPLIKASI yang dibina/dilatih	%	100	0	10.716.650	-	-	19
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Afinitas DEMAPAN dan Replikasi yang dibina/dilatih	kelompok	2	0	10.716.650	-	-	18,66
		Jumlah Laporan SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)	lap	1	0		-	-	-
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	AKE (Angka Kecukupan Energi)	KKAL/ KAP/Hari	2158,3	0	28.712.937	1.375.000	4,79	21,16
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan jumlah laporan hasil pengawasan mutu dan keamanan pangan segar Kab.KOBAR	%	100	0	3.350.000	-	-	95,52
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan mutu dan keamanan pangan	lap	1	0		-	-	#DIV/0!
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Sampel keamanan pangan	dok	1	0	25.362.937	1.375.000	5,42	11,34
	TOTAL					4.659.117.122	2.211.099.278	47,46	51,43
		Rata-Rata Capaian Kinerja (Program)	%	100	22,00				

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 22 %, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.13. Urusan Lingkungan Hidup Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.21,959,933,006.00,00 dan terealisasi sebesar Rp8,055,828,275.00,00 atau 36,68 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 37,34% Adapun realisasi anggaran urusan Lingkungan Hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.13 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Lingkungan Hidup
Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	53,39				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	6	4.487.476.225	2.476.625.516	55,19	55,24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	14	6	4.385.367.225	2.439.808.216	55,64	55,64
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	6	100.800.000	36.408.300	36,12	37,61
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	1.309.000	409.000	31,25	88,54
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	OK	2	2	19.520.000	-	-	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	OK	2	2	19.520.000	-	-	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	4	4	49.390.395	24.327.501	49,26	81,58
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Buah	878	834	18.768.945	14.596.051	77,77	77,77
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	144	144	4.105.277	4.105.277	100,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis	2	2	6.256.173	5.626.173	89,93	89,93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	OK	2	2	20.260.000	-	-	78,81
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	3	2	294.536.600	106.821.693	36,27	36,47
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	Paket	5	0	245.000	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	92.343.600	25.226.799	27,32	27,97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	6	201.948.000	81.594.894	40,40	40,40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	3	3	66.121.300	17.583.600	26,59	33,15
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	1	1	11.307.100	-	-	8,84
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa	Unit	8	6	41.174.200	8.713.600	21,16	29,27

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan perizinan							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	16	15	13.640.000	8.870.000	65,03	65,03
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Tersedianya Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	%	100	0				
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Dokumen	1	0	48.315.550	13.500.000	27,94	41,58
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Dokumen	1	0	48.315.550	13.500.000	27,94	41,58
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Air	Nilai Indeks Kualitas Air	62	0				
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	1	230.882.635	40.495.950	17,54	27,66
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik lokasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Titik lokasi	8	8	88.734.630	18.953.350	21,36	46,23
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas Udara	69	0				
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan sampel udara	Kali	1	1				
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian/analisa sampel yang dilaksanakan	Sampel	8	5	142.148.005	21.542.600	15,16	16,07
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terkendalinya Tutupan Hutan	Nilai Indeks Tutupan Hutan	55	0				
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	1	1.726.633.680	917.186.620	53,12	53,12
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH Terkelola	RTH	22	22	1.726.633.680	917.186.620	53,12	53,12
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan Yang Telah Diterbitkan	%	100	300				
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH	%	100	300	44.200.000	18.120.000	41,00	42,69
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH	Kasus	1	3	44.200.000	18.120.000	41,00	42,69

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Area Sampah dan Limbah B3	%	50	0				
	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah Yang Dikelola	Ton	39000	0	14.992.856.621	4.441.167.395	29,62	30,09
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengurangan Sampah	Ton	14000	0	72.312.493	30.432.493	42,08	43,74
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Sampah	Ton	24000	0	7.194.992.623	4.283.664.002	59,54	59,54
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Unit	37	0	7.725.551.505	127.070.900	1,64	2,54
		Rata-rata Capaian Kinerja(Program)	%	100	50,48	21.959.933.006	8.055.828.275	36,68	37,34

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 50,48%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.14. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 6,376,096,149,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2,711,849,742,00 atau 42,53 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 46,47% Adapun realisasi anggaran urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN DAN KINERJA KEUANGAN	%	100	57,33	5.464.187.116	2.897.593.747	27	63
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan	%	100	100	18.722.500	3.300.000	18	100

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kinerja keuangan							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disiapkan	Dokumen	5	4	15.422.500			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	2	-	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00
	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	%	94	52,17	4.571.694.954	2.661.539.716	58	58,33
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Disdukcapil	Orang	35	35	4.562.775.054	2.658.039.716	58	66,67
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi keuangan yang dilaksanakan	Bulan	12	6	7.790.000	3.500.000	44,93	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	939.950	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran Tahun SKPD	Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan semesteran	Dokumen	2	0	189.950	-		
	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	-	45.991.267	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Stell	3	-	-	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan budaya kerja	Orang	43	-	35.561.267	-		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti	Orang	5	-	10.430.000	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	63,64	328.283.136	73.492.998	11,19	81,82
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis	8	4	5.999.136	5.999.136	100	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan pakai habis yang disediakan	Jenis	42	26	39.573.050	-		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	1	1	2.310.000	-		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pelayanan pencetakan dan penggandaan yang disiapkan	Jenis	2	2	10.450.950	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kegiatan	22	7	269.950.000	67.493.862	25,00	27,27
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	-	-	-	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	2	-	-	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Jenis	2	-	-	-		
	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	45,83	324.396.100	153.407.717	47,29	54,17
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman blanko KTP - El yang	KG	14	0	490.000			

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		disediakan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jenis	6	5	114.007.296	49.241.284,00	43,19	58,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang disediakan	Jenis	14	14	209.898.804	104.166.433,00	49,63	50,00
		Jumlah honor TKD yang disiapkan	Bulan	12	6				
	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	25,00	175.099.159	5.853.316,00	1,67	29,17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	Unit	13	1	53.819.940	5.853.316,00	10,88	25,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	5	5	18.180.000	-		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehabilitasi	Unit	1	-	103.099.219	-	-	33,33
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	86,87	74,56	164.448.288	57.552.641,00	35,00	45,84
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	86,87	74,56	44.700.000	8.873.000,00	19,85	41,67
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam pelayanan	Dokumen	4	4	41.550.000	8.873.000	21	41,67
	Pengumpulan, Analisis dan Desiminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	10	6	3.150.000	-		
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	86,87	41,67	119.748.288	48.679.641,00	40,65	50,00
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP - EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah blangko yang disiapkan	Jenis	6	6	119.748.288	48.679.641,00	40,65	50,00
		Jumlah honor TKD yang disiapkan	Bulan	12	6				
	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	%	89,5	50,24	42.410.000	23.621.000	55,70	58,33
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil	%	89,5	50,24	42.410.000	23.621.000	55,70	58,33
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Jenis	4	4	42.410.000	23.621.000	55,70	58,33
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Instansi/ Lembaga	20	16	56.583.150	16.921.811	29,91	50,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	Instansi / Lembaga	10	-	45.508.200	16.921.811	37,18	50,00
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Iklan	2	0	8.240.000	-		

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah honor TKD yang disiapkan	Bulan	12	6	37.268.200	16.921.811	45,41	50,00
		Jumlah Kerjasama yang dibangun	Kerjasama	20	8				
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	86,87	-	11.074.950	-		
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah acara yang dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi	Kegiatan	2	-	11.074.950	-		
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	%	86,87	41,67	648.467.595	73.446.798	11,33	41,67
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyusunan profil kependudukan	%	86,87	41,67	648.467.595	73.446.798	11,33	41,67
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan lainnya	Rasio jumlah penduduk yang terdata dalam SIAK terhadap DAK Sem Kemendagri		950	1073	648.467.595	73.446.798	11,33	41,67
		Jumlah Buku Profil kependudukan yang disusun	Buku	260	0				
		Rata-rata Capaian Kinerja(Program)	%	100	60,76	6.376.096.149	3.069.135.997	48,14	51,86

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 60,76%, yang termasuk kategori **Rendah**.

2.15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6,662,139,521.00 dan terealisasi sebesar Rp. 2,936,573,563.00 atau 44,08 %, sedangkan realisasi fisik sebesar 49,33%. Adapun realisasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	60,07	4.585.439.877,00	2.280.849.249,00	49,74	60,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	Lap	1	1	13.105.000,00	5.087.000,00	38,82	40,00
	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen	Dok	1	1	13.105.000,00	5.087.000,00	38,82	40,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan Perangkat Daerah	perencanaan perangkat daerah yang disusun							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	%	100	70,42	4.228.124.365,00	2.182.621.273,00	51,62	70,42
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Orang	33	33	4.189.191.265,00	2.163.961.065,00	51,66	50,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Bulan	12	6	36.082.400,00	15.809.508,00	43,82	61,25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja keuangan akhir tahun SKPD	Lap	1	1	2.850.700,00	2.850.700,00	100,00	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya	%	90	61,25	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stell	40	2	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Orang	5	0	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	30	104.475.911,00	35.724.081,00	34,19	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	4	0	1.410.717,00	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK kantor yang disediakan	Jenis	26	4	37.526.885,00	9.976.824,00	26,59	30,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	22	13	10.918.094,00	6.944.500,00	63,61	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	4	0	12.920.215,00	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktivitas rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Ok	15	14	41.700.000,00	18.802.757,00	45,09	50,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	90	90	6.249.991,00	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit/tahun	5	4	6.249.991,00	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	90	50	126.422.160,00	49.784.495,00	39,38	50,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Waktu penyediaan rekening listrik, air,	Bulan	12	6	55.374.960,00	20.361.737,00	36,77	50,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Air dan Listrik	telepon, internet dan surat kabar							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kantor yang disediakan	Bulan	12	6	71.047.200,00	29.422.758,00	41,41	50,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	105.862.450,00	6.432.400,00	6,08	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	4	4	9.616.200,00	1.822.400,00	18,95	63,33
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Unit/ta hun	48	0	20.140.000,00	4.610.000,00	22,89	50,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruang/gedung kantor yang dipelihara/dirahabilitasi	unit	1	0	76.106.250,00	-	-	-
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase lembaga ekonomi desa (Bumdes, LKM dan pasar desa) yang berkembang	%	12	10	103.499.634,00	39.943.000,00	40,25	43,81
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase lembaga ekonomi desa (Bumdes, LKM dan pasar desa) yang berkembang	%	12	10	103.499.634,00	39.943.000,00	40,25	43,81
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas pelaku LKM dan UMKM di Pedesaan	Kegiatan	4	3	24.799.200,00	18.281.000,00	73,72	80,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kemitraan usaha antara swasta dan LED dan UEM di Pedesaan	Kemitraan/orang	2/120	2/80	46.065.234,00	21.662.000,00	47,02	51,43
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat Desa tentang Desa berpotensi SDA dan peningkatan pengetahuan tentang pembangunan kawasan pedesaan	Orang	36	0	32.635.200,00	-	-	-
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	100	16,33	1.362.469.874,00	393.669.174,00	28,89	39,06
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	Desa	81	81	1.362.469.874,00	393.669.174,00	28,89	39,06
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan kapasitas profesional program pembangunan dan PMD (P3MD)	Kali	3	1	32.599.000,00	6.600.000,00	20,25	60,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah Desa yang melaksanakan	Desa	81	0	46.273.200,00	17.698.000,00	38,25	30,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Desa	musrebang tepat waktu							
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang keuangan desa	Kali	4	0	1.009.662.900,00	269.489.800,00	26,69	33,13
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam bidang keuangan desa	Orang	243	0	94.216.450,00	15.208.874,00	16,14	36,25
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Meningkatnya usaha dan kapasitas pengelola BUMDes dan BUMDes bersama	Orang	90	0	33.241.300,00			
		Tersedianya data penyertaan modal desa pada BUMDes dan BUMDes bersama	Lap	14	16		5.378.000,00	16,18	20,00
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1. Jumlah desa yang terdata indeks desa membangun 2. Persentase desa yang telah menyusun profil desa	Desa	81	81	146.477.024,00	79.294.500,00	54,13	55,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase desa yang telah mengembangkan sistem	%	75	46	610.730.136,00	222.112.140,00	36,37	50,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase desa yang telah mengembangkan sistem	%	75	46	610.730.136,00	222.112.140,00	36,37	50,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Orang	90	0	114.398.080,00	33.000.500,00	28,85	30,00
		Peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia	Orang	81	81				
		Peningkatan kapasitas rumah desa sehat	Orang	262	0				
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Peningkatan pengetahuan tentang kemampuan pengelolaan air bersih dan sumber daya alam	Orang/kegiatan	60	1	4.080.000,00	3.494.000,00	85,64	100,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat Hukum Adat								
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya pemahaman masyarakat desa tentang teknologi tepat guna	Kegiatan	1	1	75.872.486,00	11.049.000,00	14,56	25,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK aktif	PKK	101	101	416.379.570,00	174.568.640,00	41,93	45,00
	JUMLAH					6.662.139.521,00	2.936.573.563,00	44,08	49,33
		Rata-Rata Capaian Kinerja (Program)	%	100	33,10				

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 33,10%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8,233,300,968,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4,434,217,937,00 atau 54,29%, sedangkan realisasi fisik sebesar 41,77%. Adapun realisasi anggaran urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.233.300.968	4.434.217.937	54,29	54,29
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	60	7.641.475.371	3.274.867.905	43,23	43,23
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	100	11	18.747.500	4.318.000	0,05	23,03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	2	2	5.990.000	4.318.000	0,05	72,09
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	jumlah dokumen RKA-SKPD yang	dok	1	1	2.023.750	0	-	0,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RKA-SKPD	disusun							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1	2.023.750	0	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	dok	1	1	2.098.000	0	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1	2.098.000	0	-	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	lap	3	3	553.500	0	-	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Triwulan)	lap	4	2	3.960.500	0	-	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dok	13	9	6.104.779.576	2.945.010.052	48,24	48,24
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	bulan	12	8	6.085.998.326	2.939.260.052	48,30	48,30
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Terverifikasi	dok	3000	705	15.917.500	5.000.000	31,41	31,41
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	semest er	1	1	2.863.750	750.000	26,19	26,19
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	dok	7	3	206.912.500	1.820.000	0,88	1,30
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen laporan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	dok	1	0	201.912.500	0	0,00	0,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen laporan pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	lap	6	3	5.000.000	1.820.000	36,40	53,60
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	dok	1	1	170.657.200	0	0,00	12,50
	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	dok	1	1	170.657.200	0	0,00	12,50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	jenis	2	2	23.109.120	24.049.700	104,0 7	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stell	17	17	10.200.000	10.200.000	100,0 0	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	1	1	12.909.120	13.849.700	107,2 9	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	jenis	6	3	351.551.196	51.568.850	14,67	40,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	96	45	10.086.648	3.918.750	38,85	38,85

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang disediakan							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	12	12	97.605.299	0	0,00	30,71
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	unit	56	29	15.307.567	0	0,00	24,49
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	3	3	49.711.682	0	0,00	46,36
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	orang	26	13	178.840.000	47.650.100	50,00	45,67
		Penyediaan makanan dan minuman rapat	orang	606	230			26,64	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	jenis	2	2	66.139.964	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang disediakan	unit	6	6	66.139.964	0		#VAL UE!
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	jenis	4	2	627.614.660	234.758.853	37,40	37,91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	paket	35	23	2.000.000	0	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	bulan	12	7	350.689.860	127.597.335	36,38	37,28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	12	7	274.924.800	107.161.518	38,98	38,98
		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	7			38,98	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang disediakan	jenis	2	2	71.963.655	13.342.450	18,54	28,07
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan	unit	13	9	30.496.655	3.726.550	12,22	17,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan jasa perizinan	bulan	15	13	5.600.000	615.900	11,00	15,79
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	unit	36	28	28.677.000	9.000.000	31,38	35,18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	unit	10	8	7.190.000	0	0,00	54,54
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persentase Peningkatan Koperasi yang melaksanakan	%	10	0	45.590.000	9.475.000	20,78	46,02

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KOPERASI	RAT							
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Koperasi	kopera si	23	19	45.590.000	9.475.000	20,78	46,02
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan/Pendampingan Koperasi	kegiata n	40	23	45.590.000	9.475.000	57,50	46,02
		Jumlah Laporan Pengawasan Koperasi	kegiata n	35	19			20,78	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Koperasi yang melaksanakan RAT	%	10	0	390.304.000	16.200.000	4,15	0,00
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mampu menyusun laporan pertanggungjawaban	kegiata n	60	0	229.847.038	16.200.000	7,05	7,05
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi yang terbina	kegiata n	60	0	229.847.038	0	0,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Mikro (DAK NF)	%	100	0	160.456.962	0	0,00	0,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Mikro	orang	56	0	160.456.962	0	0,00	0,00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Volume Usaha Koperasi yang meningkat	%	5	0	21.100.000	1.298.000	6,15	6,15
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi dalam pengembangan Usaha	kopera si	23	23	21.100.000	1.298.000	6,15	6,15
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Koperasi dan UMKM	lap	40	23	21.100.000	1.298.000	6,15	6,15
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Wirausaha baru	wub	75	0	123.831.597	0	0,00	0,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MIKRO (UMKM)								
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha baru	wub	75	0	123.831.597	0	0,00	0,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan	orang	75	0	123.831.597	0	0,00	0,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Usaha Mikro yang Berkembang	ukm	43	9	11.000.000	1.298.000	11,80	23,60
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Laporan Monev UMKM Binaan	lap	50	9	11.000.000	1.298.000	11,80	23,60
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Laporan Monev UMKM Binaan	lap	50	9	11.000.000	1.298.000	11,80	23,60

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** adalah sebesar 41.77%, atau masuk kategori **sangat rendah**.

2.17. Urusan Perindustrian

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.354,735,000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4,725,000,00 atau 1,33%, sedangkan realisasi fisik sebesar 1,35% Adapun realisasi anggaran Urusan Perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perindustrian Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					354.735.000			
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	%	14	0	312.430.000	0	0,00	0,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalam Pengembangan Usaha Industri	ikm	52	0	312.430.000	0	0,00	0,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten	dok	0	0	300.000.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	set	1	0	312.430.000	0	0,00	0,00
14	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	%	9	0	12.555.000	0	0,00	0,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dipantau terkait Pengawasan Perizinan dibidang Industri kewenangan kabupaten	ikm	17	0	12.555.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang dipantau terkait Pengawasan Perizinan dibidang Industri kewenangan kabupaten	ikm	17	0	12.555.000	0	0,00	0,00
15	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	%	9	0	29.750.000	4.725.000	15,88	16,07
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan/ Pemutahiran Data IKM	dok	1	0	29.750.000	4.725.000	15,88	16,07
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan/ Pemutahiran Data IKM	dok	1	0	29.750.000	4.725.000	15,88	16,07

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada **Urusan Perindustrian** adalah sebesar 5 %, atau masuk kategori **sangat rendah**.

2.18. Urusan Perdagangan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.3,597,924,251,00 dengan realisasi fisik sebesar 32,64% Adapun realisasi anggaran Urusan Perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.18 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.597.924.251		0,00	32,64
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (MoM) kurang dari 9%	%	8	0	7.905.000	0	0,00	0,00
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Toko Modern yang terpantau perizinan	Toko modern	52	15	7.905.000	0	0,00	0,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Toko Modern yang terpantau perizinan	Toko modern	52	15	7.905.000	0	0,00	0,00
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang ditingkatkan pengelolannya	%	13	22	3.243.894.551	1.122.692.032	37,04	36,11
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	pasar	1	0	474.080.751	15.492.750	5,93	13,51
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun / direvitalisasi	pasar	1	0	355.555.834	0	0,00	0,00
		Jumlah sarana dan prasarana pasar yang terpelihara	pasar	1	1		15.492.750	10,68	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengadaan Sarana prasarana pasar rakyat	unit	25	25	118.524.917	43.659.987	100	100,00
		Jumlah Profil Pasar Rakyat / Data pedagang Pasar	pedagang	1500	523			37,60	37,60
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah petugas kebersihan dan ketertiban serta petugas pungut retribusi pasar yang dibayarkan Honorariumnya	petugas	88	44	2.769.813.800	1.107.199.282	39,97	39,97
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah petugas kebersihan dan ketertiban serta petugas pungut retribusi pasar yang dibayarkan Honorariumnya	petugas	88	44	2.769.813.800	1.107.199.282	39,97	39,97
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (MoM) kurang dari 9%	%	8	6	182.070.100	2.982.000	1,64	1,64
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting	lap	12	8	172.900.100	0	0,00	64,38

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah terbitan Perkembangan Harga Komoditas yang di publikasi	kegiatan	104	63	34.400.000	0	0,00	54,65
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Sembako yang terdistribusikan ke masyarakat berpenghasilan rendah	kegiatan	2800	2400	138.500.100	89.333.750	64,50	66,80
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyaluran Komoditas Barang Penting yang	lap	6	4	9.170.000	2.982.000	32,52	32,52
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah produk/komoditas barang penting yang diawasi	kegiatan	1	1	9.170.000	2.982.000	32,52	32,52
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Realisasi Nilai Export	%	154,34 US\$	0	93.969.000	0	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ivent Pameran Promosi yang terselenggara	pameran	0	0	93.969.000	0	0,00	0,00
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Ekspertir yang terfasilitasi	peserta	0	0	93.969.000	0	0,00	0,00
		Jumlah Peserta pelatihan calon ekspertir	peserta	0	0		0	0,00	0,00
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Alat UTTP	%	65	32,5	70.085.600	680.000	0,97	4,50
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	uttp	900	350	70.085.600	680.000	0,97	4,50
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	uttp	900	350	62.668.000	680.000	1,09	5,03
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat Metrologi yang diawasi	unit	60	30	7.417.600	0	0,00	0,00
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	5	0	350.000.000	0	0,00	0,00
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pameran Promosi yang terselenggara	pameran	0	0	350.000.000	0	0,00	0,00
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Promosi yang terselenggara	pameran	0	0	350.000.000	0	0,00	0,00

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada **Urusan Perdagangan** adalah sebesar 35.50%, atau masuk kategori **sangat rendah**.

2.19. Urusan Perhubungan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.5.316.200,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.332.674.363 atau 43,88%, sedangkan realisasi fisik sebesar 48,99% Adapun realisasi anggaran Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.19 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Urusan Perhubungan
Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		%	96	80				
	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Presentase tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan	%	96	80,5				
	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah pelanggaran moda transportasi	kali	150	4	484.295.000	181.043.321	37	38
	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas dan APILL yang diadakan dan dipasang	unit	33	0	800.531.600	-	-	
	Ujicoba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah sosialisasi keselamatan dan transportasi bidang lalu lintas dan angkutan	kali	6	1	146.474.000	53.793.439	36,73	37,98
	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan	%	80	82				
	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan	dok	6	73	340.000	-	-	-
	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Persentase tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan	%	80	82				
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang disediakan	unit	23	0	280.827.000	-	-	-
	Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor	Jumlah bukti lulus uji pengujian kendaraan bermotor yang disediakan	unit	5000	2711	204.663.900	41.317.800	20,19	20,19
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	unit	15	0	114.350.000	-	-	-
	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan	Prosentase penurunan	%	50	52				

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	LLAJ kabupaten/kota	pelanggaran lalu lintas							
	Pelaksanaan penyusunan rencana rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	Jumlah dokumen sistem pengembangan transportasi dan angkutan		0	0	750.000	-	-	-
	Study Pengembangan Teknologi/Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah study pengembangan teknologi/keselamatan lalu lintas dan angkutan	dok	0	0	-	-	-	-
		Jumlah sistem perhubungan	0	0	0				
	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	%	80	83				
	Pembangunan Sarana di jalan kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana dan fasilitas Perhubungan yang dibangun	unit	4	0	614.319.263	27.402.900	4,46	7,50
	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	jumlah sarana penunjang keselamatan lalu lintas yang diadakan	unit	4	0	-	-	-	-
	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana dan fasilitas Perhubungan yang dipelihara	unit	4	4	290.586.296	13.500.000	4,65	4,65
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik		96,00	80,50				
	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Presentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	%	80	83				
	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan yang direhab/dipelihara	paket	5	3	7.041.400.000	5.635.000	0,08	11,17
	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	31,26				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	3	2	-	-	-	-
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dok. Perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	2	1	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dok. Rka yang disusun	dok	1	0	2.000.000	-	-	-
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	jumlah dok. Perubahan Rka yang disusun	dok	1	0	1.450.000	-	-	-
	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD yang disusun	dok	1	0	2.000.000	2.000.000,00	100,00	100,00
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	dok	1	0	2.000.000	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	dok	1	1	1.451.250	999.950,00	68,90	68,91
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah	dok	2	2	799.900	799.900,00	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	3	1				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	dokumen	12	6	4.319.156.833	1.942.584.631,00	44,98	44,98

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	6	358.685.800	117.968.047,00	32,89	32,89
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen	1	0	4.250.000	4.239.500,00	99,75	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	dokumen	4		1.325.000	-	-	-
	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah	dokumen	12	6				
	Pendataan dan pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	dokumen	12	6	8.316.000	3.712.500,00	44,64	44,64
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	jenis	2	1				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stel	1	0	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	orang	4	4	30.960.000	10.000.000,00	32,30	48,45
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	jenis	5	2				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	10	0	7.230.300	3.934.766,00	54,42	55,32
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	31	20	43.026.797	26.578.607,00	61,77	62,75
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	0	0	-	-	-	-

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	8	3	53.663.094	14.944.300	27,85	27,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Org/ Kali	25	10	115.740.000	29.120.907	25,16	26,09
		Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Kotak	1	0				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	jenis	4					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	6	0	572.000	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	buah	15	0	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	jenis	3	3				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	paket	50	3	245.000	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	6	145.122.558	58.508.696	40,32	40,32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	bulan	13	6	204.475.810	83.530.562	40,85	40,85
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	jenis	0	0				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	jenis	1	1	17.487.500	8.010.000	45,80	51,47
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	27	6	171.016.700	33.250.900	19,44	19,53
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	27	7	34.180.000	12.785.000	37,40	43,89
		Rata-rata Capaian Kinerja(Program)	%	100	63,92	5.316.200.100	2.332.674.363	43,88	48,99

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Perhubungan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 63,92%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.20. Urusan Penanaman Modal

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5,316,200,100,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,332,674,363,00 atau 43,88%, sedangkan realisasi fisik sebesar 48,99% Adapun realisasi anggaran urusan Penanaman Modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	%	100	-	38.665.450	-	-	-
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dokumen	2	-	20.965.500	-	-	-
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dokumen	2	-	20.965.500	-	-	-
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan peluang penanaman modal daerah yang terdokumentasi ke dalam sistim informasi peluang investasi daerah	Dokumen	6	-	17.699.950	1.220.000	6,89	20,08
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat	Dokumen	1	-	7.693.750	1.220.000	15,86	15,86
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data potensi penanaman modal di daerah	Dokumen	1	-	10.006.200	-	-	23,33
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	%	2,43	37,82	129.897.601	22.647.403	17,43	19,59
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	-	-	-	129.897.601	22.647.403	17,43	19,59
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	-	75.197.600	11.647.403	15,49	19,21
		Jumlah jenis publikasi informasi DPMPSTP	Jenis	1	1				

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis media promosi yang disediakan	Jenis	2	-	54.700.001	11.000.000	20,11	20,11
		Jumlah pameran tingkat daerah dan tingkat nasional yang diikuti	Kali	1	-				
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui	%	98,00	98,97	103.052.000	28.149.352	63,13	35,95
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui	Dokumen	1.900	1.051	103.052.000	28.149.352	63,13	35,95
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan Perizinan Berusaha yang Disetujui Melalui OSS	Buah	950	526	45.193.100	14.074.676	31,14	39,33
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan	Dokumen	950	525	44.002.900	14.074.676	31,99	40,39
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Kali	2	-	13.856.000	-	-	10,83
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	%	60	56,62	351.179.850	-	-	18,30
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah	Jenis	2	3	351.179.850	-	-	18,30
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan Penanaman Modal dan Perizinan	Perusahaan	150	8	49.799.750	-	-	7,90
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	OK	75	87	194.773.300	-	-	9,20
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	%	60	-	7.684.250	-	-	43,73
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data PMA/PMDN perizinan dan non perizinan	Dokumen	1	-	7.684.250	-	-	43,73
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan data PMA/PMDN perizinan dan non perizinan	Dokumen	1	-	7.684.250	-	-	43,73

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	58,33	4.685.720.949	2.281.877.608,00		100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	24	14	4.939.150	1.249.850,00		100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	3	487.200	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	2	-	60.000	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	900.050	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1.249.850	1.249.850,00	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	812.350	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	13	9	454.800	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	974.900	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	227	130	4.235.681.912	2.086.204.438,00	49,25	49,25
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	26	13	4.193.300.612	2.072.129.762,00	49,42	49,42
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	185	104	40.745.100	40.745.100	100	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	-	1.408.800	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	Laporan	25	12	227.400	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	9.943.050	-	-	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Stell	-	-				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	1	1	9.943.050	-	-	100,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	7	7	88.224.289	31.052.142,00	35,20	35,20
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	6	-	5.250.740		-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	22	11	13.545.554	9.059.303	66,88	66,88
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Buah	76	39	5.172.739	1.150.000	54,12	54,12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	11	11	28.355.322	10.298.420	36,32	36,32
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	7	2	16.206.969	10.544.419	65,06	65,06
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang Disediakan	Orang	5	3	19.692.965	-	-	64,74
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah yang diadakan	Unit	7	7	70.623.478	70.623.478	99,78	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	7	7	70.623.478	70.623.478	99,78	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	3	3	217.859.600	91.231.178	41,88	49,82
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/Paket yang Terkirim	Surat	25	-	770.000	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6	113.152.800	49.751.106	43,97	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	6	103.936.800	41.480.072	39,91	50,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	2	2	58.449.470	1.670.000	4,81	4,81
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit	7	7	23.699.470	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44	22	34.750.000	1.670.000	4,81	4,81
		Rata-rata Capaian Kinerja(Program)	%	100	37	5.316.200.100	2.332.674.363	43,88	48,99

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 37%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.21. Urusan Komunikasi dan Informatika

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp8,263,316,255,00 dan terealisasi sebesar Rp3,409,847,871,00 atau 41,26%. Adapun realisasi anggaran Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	18,73	4.911.396.255	2.465.067.097	50,19	52,21
	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	16	7	4.508.923.350	2.341.100.737	51,92	52,34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam Setahun	Dokumen	14	7	4.505.623.350	2.341.100.737	51,96	52,35
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang di Laksanakan	Lembar	400	200	3.300.000	-	0,00	50,00
	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang di Sediakan	Jenis	5	4	105.041.293	19.646.455	18,70	52,90
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	10	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	48	48	24.331.769	8.680.331	35,67	50,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	11	11	6.086.124	6.086.124	100	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	5	1	12.523.400	4.880.000	38,97	50,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Akifitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	ok	51	10	62.100.000	-	0,00	50,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Sediakan	Jenis	2	2	254.756.112	99.294.905	38,98	50,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6	69.116.112	23.300.199	33,71	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	6	185.640.000	75.994.706	40,94	50,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	2	42.675.500	5.025.000	11,77	50,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
		yang di Sediakan							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit	4	3	25.186.900	3.700.000	14,69	50,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Jenis	4	2	17.488.600	1.325.000	7,58	50,00
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	%	100	50	801.250.000	22.000.000	2,75	50,00
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi	4	1	801.250.000	22.000.000	2,75	50,00
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yang dilaksanakan	Laporan	6	3	78.450.000	-	0,00	50,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik yang dikelola	Konten	5	4	83.575.000	22.000.000	26,32	50,00
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik	Informasi	1	1	19.450.000	-	0,00	50,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas yang diselenggarakan	Media	12	12	619.775.000	-	0,00	50,00
	PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	PERSENTASE APLIKASI INFORMATIKA	%	100	50	2.550.670.000	922.780.774	36,18	50,00
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jaringan Pendukung Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Jaringan	4	1	2.167.120.000	816.530.774	37,68	50,00
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang diselenggarakan	Unit	6	3	2.167.120.000	816.530.774	37,68	50,00
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang di Kelola	layanan	4	1	383.550.000	106.250.000	27,7	50,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan	1	-	100.000.000	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik yang di Koordinasikan	sistem	1	-	-	-	-	-
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Aplikasi	1	1	264.000.000	106.250.000	40,25	50,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
	elektronik	Berbasis Elektronik yang di Kembangkan							
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yang di Kembangkan dan di Kelola	Orang	79	-	19.550.000	-	0,00	50,00

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada **Komunikasi dan Informatika** adalah sebesar 45 %, atau masuk kategori **sangat rendah**.

2.22. Urusan Statistik dan persandian

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Statistik dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.62,150,000,00 dan terealisasi 0%. Adapun realisasi anggaran Urusan Perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	%	100	25	32.150.000	-	0,00	50,00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rilis Data Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	data	12	-	32.150.000	-	0,00	50,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	80	-	32.150.000	-	0,00	50,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	%	100	50	30.000.000	-	0,00	50,00
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi	1	1	30.000.000	-	0,00	50,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang dilaksanakan	Informasi	1	1	30.000.000	-	0,00	50,00
	TOTAL					62.150.000			

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Statistik dan Persandian adalah sebesar 15 % atau masuk kriteria Sangat Rendah.

2.23. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.6,925,853,781,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,464,425,554,00 atau 35,58%, sedangkan realisasi fisik sebesar 37% Adapun realisasi anggaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23 Realisasi Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	-	4.698.654.441	2.208.345.799	47	47
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Dan Kinerja Keuangan	%	90	-	101.498.200	35.689.460	35	35
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	Dokumen	15	8	100.248.200	34.439.460	34	34
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang disusun	Laporan	2	2	1.250.000	1.250.000	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	%	90	52	3.892.022.948	2.026.718.712	52,07	52,09
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam Setahun	Bulan	12	6	3.847.442.348	2.010.789.207	52	52,26

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	6	5.000.000	-	-	10,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	1	1	2.025.000	1.275.000	62,96	62,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran yang disusun	Laporan	18	9	37.555.600	14.654.505	39,02	39,02
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya	%	90	-	51.900.000	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas ASN	Stell	7	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	OK	5	2	51.900.000	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	-	90.639.176	20.930.080	23	26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Jenis	6	6	1.989.746	1.926.700	97	97
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Buah	4	32	30.556.380	12.569.510	41,14	41,14
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis	6	3	17.023.050	6.433.870	37,80	37,80
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aktivitas Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang disediakan	OK	16	-	41.070.000	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercukupan administrasi	%	90	1	8.999.991	8.998.000	99,98	100,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jenis	1	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Unit	1	1	8.999.991	8.998.000	99,98	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	90	-	302.090.316	109.034.547	36,09	36,09
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6	73.867.000	25.183.237	34,09	34,09
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	6	228.223.316	83.851.310	36,74	36,74
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	4	251.503.810	6.975.000	2,77	4,53

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	5	2	25.913.810	1.255.000	4,84	21,93
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan	Unit	30	11	15.710.000	5.720.000	36,41	36,41
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	1	-	209.880.000	-	-	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	%	80	-	482.365.940	32.342.405	6,70	25,43
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Kepemudaan terlaksana	Kegiatan	5	2	479.365.940	32.342.405	6,75	25,59
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Termotivasinya dan terbukanya wawasan kewirausahaan pemuda di kotawaringin barat	Kegiatan	2	1	32.280.000	-	-	
	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Terlaksana	Kegiatan	2	2	42.079.940	14.002.555,00	33,28	33,28
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kegiatan Terlaksana	Kegiatan	1	1	405.006.000	18.339.850,00	4,53	26,83
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3.000.000	-	-	
	Penigkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang di bina	Kegiatan	1	-	3.000.000	-	-	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	%	80	-	1.638.316.600	180.293.235,00	11,00	11,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kegiatan	7	-	329.730.000	-	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Terlaksana	Kegiatan	7	-	329.730.000	-	-	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan GALA DESA, BUPATI CUP, POPKAB, PORKAB, POP PROV dan POR PROV	Kegiatan	4	1	281.750.150	87.381.430,00	31,01	31,01

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya prestasi GALA DESA, BUPATI CUP, POPKAB, PORKAB, POP PROV dan POR PROV	Kegiatan	4	1	281.750.150	87.381.430,00	31,01	31,01
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Keikutsertaan event-event olahraga di semua cabang prestasi	Kegiatan	31	12	932.969.090	92.911.805,00	9,96	9,96
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya event-event olahraga disemua cabang prestasi	Kegiatan	31	12	932.969.090	92.911.805	10	9,96
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terselenggaranya Kegiatan Olahraga Kesegaran Jasman dan rekreasi	Kegiatan	4	-	93.867.360	-	-	
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya kegiatan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi	Kegiatan	4	-	93.867.360	-	-	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah event Kepramukaan yang diikuti	Kegiatan	3	1	106.516.800	43.444.115,00	40,79	40,79
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pramuka Yang Terlaksana	Kegiatan	3	1	106.516.800	43.444.115,00	40,79	40,79
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah kegiatan pramuka yang terlaksana	Kegiatan	3	1	106.516.800	43.444.115,00	40,79	40,79
		Rata-rata Capaian Kinerja(Program)	%	100	40,00	6.925.853.781	2.464.425.554	35,58	37,00

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 40%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.24. Urusan Perpustakaan Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.5,298,160,617,00 terealisasi sebesar Rp.2,415,656,540,00 atau 45,59%, dan realisasi fisik sebesar 61,75%. Adapun realisasi anggaran urusan Perpustakaan dan Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.24 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	%	100	65,98	4.629.045.102	2.283.447.713	49,33	63,86
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	4	7.559.000	545.000	7,21	7,21
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	-	1.440.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1.470.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1.470.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1.317.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	-	1.317.000	0	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	255.000	255.000	100,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	290.000	290.000	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	165	108	4.112.928.694	2.146.160.691	52,18	65,98
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokumen	14	14	4.009.036.694	2.105.495.128	52,52	66,62
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	150	93	102.867.000	40.390.563	39,26	40,66
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	1.025.000	275.000	26,83	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	19.780.000	0	0,00	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Ok	2	2	19.780.000	0	0,00	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	5	5	98.133.481	9.113.678	9,29	33,46

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	17	17	5.211.723	995.775	19,11	38,32
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	57	57	31.468.195	4.999.313	15,89	34,95
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	172	141	7.152.563	2.119.590	29,63	57,19
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis	2	2	7.541.000	999.000	13,25	72,92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Ok	5		46.760.000	0	0,00	21,92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	Jenis	3	3	334.681.427	127.628.344	38,13	49,94
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	surat/paket	14	14	490.000	0	0,00	7,14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	137.533.427	51.352.578	37,34	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	6	196.658.000	76.275.766	38,79	50,00
		jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	3				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jenis	4	3	55.962.500	0	0,00	39,53
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	1	1	9.000.000	0	0,00	49,54
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	4	4	22.713.500	0	0,00	51,75
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	22	9	17.749.000	0	0,00	33,30
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Jenis	2	-	6.500.000	0	0,00	0,00
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pengunjung ke perpustakaan daerah	%	75	35,12	660.622.265	132.208.827	20,01	48,77
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	4	3	653.972.473	132.208.827	20,22	48,89

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah TIK Layanan Perpustakaan yang diadakan	Unit	12	12	300.000.000	0	0,00	48,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga pengelola Perpustakaan dan pustakawan yang di bina	Orang	55	-	13.946.472	0	0,00	3,17
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan	kegiatan	1	1	324.900.000	129.653.085	39,91	49,86
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan jenis koleksi bahan perpustakaan	Jenis	5	5	15.126.001	2.555.742	16,90	43,94
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	1	1	6.649.792	0	0,00	36,84
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Sosialisasi dan Publikasi yang di Laksanakan	kegiatan	2	1,34	6.649.792	0	0,00	36,84
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSINASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pengunjung ke perpustakaan daerah	%	75	35,12	8.493.250	0	0,00	42,86
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	1	1	8.493.250	0	0,00	42,86
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang ditelusuri	Naskah	1	-	8.493.250	0	0,00	42,86

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada Urusan Perpustakaan adalah sebesar 63.86%, atau masuk kategori **rendah**.

2.25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp.13,142,615,146,00** dan terealisasi sebesar Rp. **4,435,840,287,00** atau 33,75%, sedangkan realisasi fisik sebesar 97,68% Adapun realisasi anggaran urusan Kelautan dan Perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25 Realisasi Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					13.142.615.146	4.435.840.287	33,75	97,68
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	80	4.267.253.784	2.158.799.701	50,59	136,87
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	34	8	71.870.050	27.950.567	38,89	51,08
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Yang Disusun	Dok	2	2	1.579.000	-	-	50,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	Dok	1	1	1.995.250	-	-	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun	Dok	1	1	2.092.800	-	-	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun	Dok	1	1	4.050.150	4.050.150	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun	Dok	1	-	1.995.250	-	-	40,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Dok	25	12	45.437.600	19.880.417	43,75	52,81
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dok	3	3	14.720.000	4.020.000	27,31	28,85
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	28	21	3.462.369.500	1.807.461.239	52,20	32,34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN Dalam Setahun	Dok	14	14	3.419.669.200	1.789.216.022	52,32	32,08
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dok	12	6	41.038.600	16.878.517	41,13	51,16
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Lap	1	1	1.366.700	1.366.700	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang Disusun	Lap	1	1	295.000	-	-	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jenis	2	2	12.920.000	11.465.550	88,74	100,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang Diadakan	Stell	4	4	2.400.000	2.400.000	100	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Diikuti	Ok	1	1	10.520.000	9.065.550	86,17	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jenis	5	3	187.922.834	100.110.963	53,27	57,30
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang disediakan	Jenis	14	14	10.491.100	4.995.780	47,62	50,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	29	-	55.736.120	25.045.999	44,94	50,03
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang diadakan	Jenis	9	-	7.528.960	2.985.770	39,66	45,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	Jenis	6	5	32.366.654	18.357.554	56,72	56,80
		Jumlah Pengadaan	Lembar	118.324	43.238				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aktifitas Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah Yang Disediakan	Ok	30	12	81.800.000	48.725.860	59,57	64,53
		Jumlah aktifitas Rapat-rapat Koordinasi yang Disediakan	Ok	90	-				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis	1	1		3.320.000	98,37	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang diadan	Unit	1	1		3.320.000	98,37	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	2	433.017.900	170.857.282	39,46	53,90
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6	164.633.100	59.669.528	36,24	60,26
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	12	6	268.384.800	111.187.754	41,43	50,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang disediakan	Jenis	3	3	99.153.500	37.634.100	37,96	63,64

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Oprasional/Lapangan yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perjanjian	Unit	28	13	11.539.000	-	-	41,67
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan Yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan perizinan	Unit	28	21	59.290.500	29.632.100	49,98	78,41
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	Unit	39	6	28.324.000	8.002.000	28,25	41,67
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	50	50	5.711.017.396	1.310.261.567	22,94	74,61
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelompok Penangkapan Ikan Yang Dikelola dan disediakan Sarana dan Prasarannya	Kelompok	72	40	5.694.397.396	1.298.442.618	22,80	74,60
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi dan Iptek	Dok	1	1	88.795.200	34.231.658	38,55	43,47
		Jumlah Laporan Produksi Perikanan Tangkap	Lap	12	6				
		Jumlah peserta Sosialisasi Informasi dan Iptek	Ok	40	-				
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Perikanan Yang Terdaftar	Kelompok	100	100	5.605.602.196	1.264.210.960	22,55	75,09
		Jumlah Kelompok Yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana	Kelompok	69	27				
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan, Pendampingan dan Diklat Pada Kelompok perikanan	Kali	1	-	16.620.000	11.818.949	71,11	78,75
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pemasaran hasil perikanan dan jumlah peserta	Ok	40	-	16.620.000	11.818.949	71,11	78,75
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	14,26	42,5	1.779.989.146	861.658.434	48,41	199,22
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil yang terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya	Kelompok	25	12	808.880.000	309.459.900	38,26	59,00
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pokdakan yang terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya	Kelompok	28	26	808.880.000	309.459.900	38,26	59,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pengelolaan produksi benih ikan	Kelompok	20	10	971.109.146	552.198.534	56,86	52,27
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produksi Perikanan Budidaya	Lap	12	6	48.113.100	14.827.517	30,82	41,28
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Benih di BBI Pinang Merah	Ekor	2.000.000	2.905.145	725.763.488	371.589.692	51,20	62,95
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi sarana dan Prasarana BBI Pinang Merah Yang Tersedia (DAK)	Paket	4	2	144.000.000	138.582.608	96,24	100,00
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pembudidaya Yang Dipantau Kesehatan Ikan, Sanitasi Lingkungan dan Pakan	Unit usaha	25	12	53.232.558	27.198.717	51,09	58,03
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha Hasil Perikanan Yang di Kembangkan	%	100	50	314.617.385	105.120.585	33,41	33,00
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Izin	10	1	84.535.200	37.198.034	44,00	51,60
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	Izin/dokumen	10	1	84.535.200	37.198.034	44,00	51,60
		Jumlah Laporan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan yang Disusun	Lap	12	6				
		Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Perizinan Usaha Perikanan	Ok	30	-				
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Yang Dibina dan dikembangkan	Kelompok	15	6	40.197.600	16.300.417	40,55	49,25
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Yang Dibina dan Dikembangkan	Kelompok	15	6	40.197.600	16.300.417	40,55	49,25
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan Penyaluran Sarana dan prasarana Pengolahan Perikanan	kegiatan	1	1	189.884.585	51.622.134	27,19	30,00

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	unit	1	-		19.937.500	1,99	30,00
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklhasr Yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan	kelompok	2	-	189.884.585	31.684.634	-	0,00
		Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)	unit	1	1			16,69	21,28
		Rata-Rata Capaian Kinerja (Program)	%	100	55,63				

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, Dinas Perikanan telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 55%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.26. Urusan Pariwisata

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.5,808,305,089,00 dan terealisasi sebesar Rp.2,533,133,826,00 atau 43,61%, sedangkan realisasi fisik sebesar 50%. Adapun realisasi anggaran urusan Pariwisata selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.438.485.907	2.306.083.506	51,96	141,90
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	3	52.227.000	24.197.255	46,33	53,27
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	2	1	11.360.000	7.317.000	64,41	75,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	Dokumen	1	0	800.000	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	Dokumen	1	0	800.000	-	0,00	0,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	Dokumen	1	1	1.515.000	1.515.000	100,00	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun	Dokumen	1	0	1.515.000	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun	Dokumen	1	1	35.576.150	15.365.255	43,19	50,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	0	660.850	-	0,00	0,00
							-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	8		3.907.086.882	2.030.755.218	51,98	58,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan tunjangannya	Orang	29	29	3.899.049.882	2.027.468.218	52,00	58,33
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pelaksanaan penata usahaan dan verifikasi keuangan	Bulan	12	4	4.000.000	-	0,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersajinya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	4.037.000	3.287.000	81,42	95,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Keuangan	%	100	-	24.486.000	18.000.000	73,51	75,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Jenis retribusi yang disediakan	Jenis	5	3	24.486.000	18.000.000	73,51	75,00
							-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	3	-	-	-	0,00	0,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan teknis	Orang	9	-	-	-	0,00	0,00
							-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	Jenis	5	-	88.368.784	60.020.140	67,92	73,41
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Unit	5	-	1.498.684	494.800	33,02	41,67
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	30	-	22.492.950	6.997.500	31,11	50,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	6	-	10.477.150	-	0,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aktivitas Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi yang disediakan	Kali	26	-	53.900.000	52.527.840	97,45	98,33

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan				73.023.731	72.961.995	99,92	100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Jenis	3	-	73.023.731	72.961.995	99,92	100,00
							-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan				228.032.145	91.726.398	40,23	49,94
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/ Paket terkirim	Kg	8	-	280.000	-	0,00	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu langganan Telepon, Listrik dan Koran	Bulan	12	3	82.851.700	27.873.478	33,64	50,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa dan Jenis Alat Kebersihan Kantor	Bulan	12	3	144.900.445	63.852.920	44,07	50,00
							-		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang disediakan	Jenis	2	-	65.261.365	8.422.500	12,91	17,66
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan perijinannya	Unit	1	-	15.584.000	2.400.000	15,40	16,67
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan perijinannya	Unit	8	-	30.517.365	1.300.000	4,26	8,33
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Jenis	3	-	19.160.000	4.722.500	24,65	33,33
							-		
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase peningkatan destinasi pariwisata	%	7		923.148.932	166.127.100	18,00	35,18
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tercapainya pengelolaan Destinasi Pariwisata	%	7		923.148.932	166.127.100	18,00	35,18
	Perencanaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Desa wisata yang ditetapkan		2	-	25.495.000	1.360.000	5,33	6,67
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pembangunan Saran Prasarana Pariwisata	Unit	7	-	539.519.862	10.274.000	1,90	12,66
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah Obyek Wisata Yang ditetapkan/ dikelola	Lokasi	3	3	358.134.070	154.493.100	43,14	50,00
							-		
3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Peningkatan Jumlah Wisatawan	%	7	-	191.989.050	33.097.010	17,24	19,39
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Wisata Nasional dan	Event	1	-	191.989.050	33.097.010	17,24	19,39

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daerah							
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi wisata	Media	2	-	110.353.600	19.257.505	17,45	25,00
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi wisata nasional dan daerah	Event	1	-	34.197.600	13.839.505	40,47	41,26
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Data potensi wisata	Dokumen	1	-	47.437.850	-	0,00	18,99
							-		
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					254.681.200	27.826.210	10,93	24,31
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	%	30	-	180.973.600	13.986.705	7,73	26,42
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pramuwisata yang mempunyai legalitas dan berkompotensi	Orang	50	-	-	-	0,00	0,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peran serta masyarakat	Orang	50	-	51.647.600	13.986.705	27,08	33,33
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Event	Event	7	-	110.186.000	-	0,00	25,00
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang terlatih	Orang	60	-	19.140.000	-	0,00	31,66
							-		
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Prosentase Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dilatih	%	30	-	73.707.600	13.839.505	18,78	25,00
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan Yang diadakan	Kegiatan	4	-	73.707.600	13.839.505	18,78	25,00
	TOTAL					5.808.305.089	2.533.133.826	43,61	50,00

Dari tabel di atas, diketahui bahwa sampai dengan akhir triwulan II tahun 2021, RSUD Sultan Imanudin telah meraih rata-rata capaian kinerja sebesar 50%, yang termasuk kategori **sangat rendah**.

2.27. Urusan Pertanian

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh dua instansi pengampu yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.9,908,770,508,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3,626,559,646,00 atau 36,6%, sedangkan realisasi fisik sebesar 44,08% serta oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.21,015,102,200,00 dan terealisasi sebesar Rp.8,791,140,501,00 atau 41,83%, sedangkan realisasi fisik sebesar 46,13%. Adapun realisasi anggaran urusan Pertanian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	%	100	50	5.969.944.788	3.125.381.674	52,35	52,35
	3.27.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan perencanaan dan evaluasi Evaluasi Peramngkat Daerah	%	100	50	3.737.750	0	0	50
	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dok	16	8	2.925.050	0	0	50
	3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dok	5	3	812.700	0	0	60
	3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian dan kinerja keuangan	%	100	50	5.234.120.957	2.898.664.643	55,38	55,38
	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dok	14	10	5.224.292.757	2.895.599.143	55,43	58,33
	3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Lap	1	1	9.015.500	3.065.500	34,00	100
	3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disusun	Lap	12	6	812.700	0	0	41,67
	3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	%	100	50	21.570.000	10.000.000	46,36	50
	3.27.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun yang dipulangkan	Orang	3	2		-	-	0,00

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang diikuti	Orang	5	2	21.570.000	10.000.000	46,36	50
	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50	121.678.567	18.610.347	15,29	15,29
	3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	10	0	5.148.352	0	0	2,09
	3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	23	16	32.306.254	4.563.515	14,12 58	20
	3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Jenis	4	2	18.870.961	6.689.828	35,45	47,09
	3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	Ok	88	27	65.353.000	7.357.004	11,26	15,08
	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50	493.721.714	187.401.884	37,96	37,96
	3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	108.999.568	35.600.799	32,66	41,66
	3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	Orang	12	6	384.722.146	151.801.085	39,46	41,09
	3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	50	95.115.800	10.704.800	11,25	11,25
	3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	2	1	12.068.700	0	0	10,09
	3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	35	7	51.593.100	2.914.800	5,65	7,09
	3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	46	18	31.454.000	7.790.000	24,77	40,73
2	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	10	4	2.827.895.558	229.627.300	8,12	8,12
	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak di Kawasan	%	10	4	238.281.078	2.040.000	0,86	0,86

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Tersedianya sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan tepat guna	Jenis	37	10	238.281.078	2.040.000	0,86	0,86
	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak di Kawasan	%	10	4	350.960.950	165.656.100	47,20	47,20
	3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah ternak yang dipelihara dan dikembangkan	Ekor	5500	150	196.962.950	129.891.100	65,95	70,09
	3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Penerapan Good Farming Practice Ternak Non Ruminansia	Pelaku usaha	250	56	153.998.000	35.765.000	23,22	0,00
		Jumlah Penerapan Good Farming Practice Ternak Ruminansia	Pelaku usaha	700	43				25,08
	3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak di Kawasan	%	10	4	44.305.140	14.045.000	31,70	34,09
	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pakan ternak yang bermutu	Ton	227000	150	44.305.140	14.045.000	31,70	34,09
	3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	10	82,85	162.591.000	47.886.200	29,45	31,06
	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelayanan IB dan ET	Akseptor	2200	1001	162.591.000	47.886.200	29,45	31,06
	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	10	82,85	2.031.757.390	0	0	24,09
	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah jenis ternak yang diadakan	Jenis	4	0	2.031.757.390	0	0	24,09
3	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak di Kawasan	%	10	82,85	238.126.585	17.992.000	7,56	7,56
	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	10	82,85	46.405.375	16.192.000	34,89	36,08
	3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah pelaku usaha yang mampu mengakses pembiayaan dan berinvestasi bidang peternakan	Pelaku usaha	60	25	46.405.375	16.192.000	34,89	36,08
	3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	8	2	189.647.460	1.800.000	0,95	10,09

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pengembangan kawasan peternakan	Unit	5	2	189.647.460	1.800.000	0,95	10,09
	3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Pengembangan kawasan peternakan	%	8	2	2.073.750	0	0	3,09
	3.27.03.2.04.01 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Pengembangan kawasan peternakan	Unit	5	2	2.073.750	0	0	3,09
4	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Angka Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) dan Gangguan Reproduksi	%	8	8	365.148.288	114.439.900	31,34	31,34
	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) dan Gangguan Reproduksi	%	8	8	21.995.000	5.304.150	24,12	26,09
	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dicegah	Penyakit	25	23	21.995.000	5.304.150	24,12	26,09
	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) dan Gangguan Reproduksi	%	8	8	72.720.000	29.336.700	40,34	42,09
	3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dicegah	Penyakit	25	23	72.720.000	29.336.700	40,34	42,09
	3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Angka Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) dan Gangguan Reproduksi	%	8	8	167.114.000	49.859.500	29,84	32,09
	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak dan hewan kesayangan yang mendapat pelayanan keswan	Ekor	1000	300	167.114.000	49.859.500	29,84	32,09
	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Angka Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) dan Gangguan Reproduksi	%	8	8	103.319.288	29.939.550	28,98	28,98
	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah penumbuhan dan pengembangan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan	Pelaku usaha	18	10	35.936.738	9.600.000	26,71	28,09

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Surat keterangan higiene dan sanitasi untuk usaha produk hewan (NKV)	Unit	10	3	67.382.550	20.339.550	30,19	35,42
5	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Peternak	%	10	45	161.056.200	2.435.000	1,51	9,09
	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Agribisnis Peternakan	%	10	45	161.056.200	2.435.000	1,51	9,09
	3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah penguatan kelembagaan peternak	Kelom pok	36	15	161.056.200	2.435.000	1,51	9,09
6	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	%	100	50	346.599.089	136.683.772	39,44	39,44
	3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	%	100	50	34.999.672	15.229.025	43,51	49,98
	3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	6	34.999.672	15.229.025	43,51	49,98
	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Angka Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) dan Gangguan Reproduksi	%	8	8	311.599.417	121.454.747	38,98	41,09
	3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah dokumen surat keterangan kehatan dan asal daging	Dok	3000	331	311.599.417	121.454.747	38,98	41,09
	TOTAL					9.908.770.508	3.626.559.646	36,60	44,08
		Rata-Rata Capaian Kinerja (Program)	%	100	48,31				

Rata-rata capaian kinerja program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebesar 48,31 % atau masuk kriteria Sangat Rendah.

2.28. Urusan Pertanahan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52,465,000,00 dan terealisasi sebesar 7,579,000 atau 14,45%. Adapun realisasi anggaran urusan Pertanahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.28 Realisasi Pelaksanaan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase konflik-konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	%	80	0	20.110.000	2.196.000	10,92	11,28
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Lokasi	2	2	20.110.000	2.196.000	10,92	11,28
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdata/terinventarisasi	Lokasi	2	2	20.110.000	2.196.000	10,92	11,28
		Jumlah penyuluhan/ pencegahan/mediasi/ fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan di perumahan dan kawasan permukiman	Kegiatan	0	0				
7.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase aset daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	%	100	0	15.300.000	3.310.000	21,63	29,93
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Kegiatan	3	1	15.300.000	3.310.000	21,63	29,93
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	1	15.300.000	3.310.000	21,63	29,93
8.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	18,68	40,38	17.055.000	2.073.000	12,15	12,98
	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen database penggunaan tanah yang tersusun	Dokumen	1	1	17.055.000	2.073.000	12,15	12,98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	6.815.000	975.000	14,31	16,11
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	10.240.000	1.098.000	10,72	10,89
		Jumlah luas lahan permukiman yang terdata	Ha	0	0				
TOTAL						9.312.455.900	3.587.318.678	38,52	60,15
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PROGRAM)			%	61,87	36,12				

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja pada **Urusan Pertanahan** adalah sebesar 36.12%, atau masuk kategori **sangat rendah**.

2.29. Urusan Kearsipan

Realisasi Pelaksanaan Program

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.73,290,883,00 dan terealisasi sebesar RP. 28,397,074,00 atau 38,75%. Adapun realisasi anggaran urusan Kearsipan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.29 Realisasi Pelaksanaan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2021
(Akhir Triwulan II)**

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pembinaan Kearsipan	%	70	55	6.110.883	1.811.040	29,64	43,38
		Persentase pengawasan kearsipan yang telah dilaksanakan	%	100	147				
		Persentase arsip yang dikelola dan akses dengan baik	%	30	34,35				
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/kota	Jenis	1	1	5.270.883	1.811.040	34,36	34,36
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis dan inaktif yang dikelola	Arsip	42.897	21.448	5.270.883	1.811.040	34,36	34,36
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jenis	1	1	840.000	0	0,00	100,00
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan kepada Unit Kearsipan Desa/Kel untuk menerapkan Standar pengelolaan arsip	Desa/Kel	6	6	840.000	0	0,00	100,00
		Jumlah pengawasan kearsipan	SKPD	5	-				
		Jumlah Tenaga kearsipan yang dibina	Orang	40	59				
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola dan akses dengan baik	%	30	34,5	67.180.000	26.586.034	39,57	48,23
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penyelamatan Arsip PD Kabupaten Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jenis	1	1	67.180.000	26.586.034	39,57	48,23
	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip statis Desa/Kelurahan Pemekaran	Arsip	20	2	67.180.000	26.586.034	39,57	48,23

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			APBD	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah penyediaan jasa Arsiparis	OB	2	2				
	TOTAL					5.371.451.500			

Rata-rata capaian kinerja program pada urusan Kearsipan adalah sebesar 56,75 % atau masuk kriteria **Rendah**.

2.30. Unsur Sekretariat Daerah

Realisasi Pelaksanaan Program

Unsur Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 44,565,198,666.00 dan terealisasi sebesar Rp.13,625,036,087,00 atau 30,57%, sedangkan realisasi fisik sebesar 36,30% Adapun realisasi anggaran unsur penunjang Sekretariat Daerah selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30 Realisasi Pelaksanaan Program Unsur penunjang Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021 (Akhir Triwulan II)

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			PAGU APBD (Rp.)	REALISASI APBD		
			Satuan	Target	Realisasi		REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
							Rp	(%)	
1	2								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					35,617,810,316	12,454,661,488	34.97	41.70
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokum en	18	16	12,845,059,808	6,704,082,677	52.19	59.55
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam setahun	Dokum en	14	8	12,498,452,308	6,577,100,127	52.62	60.09
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokum en	12	6	337,788,000	121,062,800	35.84	39.67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Lapora n	2	2	5,919,750	5,919,750	100.0 0	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang disusun	Lapora n	2	-	2,899,750	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokum en	16	6	100,893,000	52,822,898	52.36	52.38
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung/barang milik daerah yang diasuransikan	unit	12	5	79,150,000	52,822,898	66.74	66.77